

Setahun sudah Jenderal Listyo Sigit Prabowo duduk di kursi Kapolri sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2021 lalu.

Sejumlah keberhasilan dan prestasi telah ditorehkan oleh mantan Kabareskrim yang dipilih menggantikan Jenderal Idham Azis itu. Sejumlah peristiwa penting juga telah terjadi di 365 hari masa kepemimpinan Sigit yang menjabat sebagai Kapolri ke-26 ini.

Namun, tak semua peristiwa itu—tentu saja—bermuda positif. Jalan masih panjang dan pekerjaan rumah masih menumpuk untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas korps baju cokelat yang ia pimpin.

Sejumlah isu negatif, untuk tidak menyebut memalukan, juga menerpa di era kepemimpinannya yang kontan merupakan ujian leadership bagi lulusan Akademi Kepolisian angkatan 91 ini.

Buku ini berupaya memotret harapan-harapan itu—dari sejumlah tokoh dan orang hebat. Tulisan dan wawancara, itu tentu berdasarkan perspektif personal mereka tentang Sigit dan Polri. Tapi tentu semua itu pasti belum bisa merangkum dan menggambarkan semua yang telah dilakukan Sigit.

Meski bukan dimaksudkan buku yang berisi puja-puji kepada Sigit, namun tulisan itu telah menunjukkan bahwa telah ada yang dilakukan Sigit dalam setahun kepemimpinannya dan ia telah mendapatkan pengakuan dari apa yang seharusnya didapatkan: kepercayaan dan harapan.

Sigit menjanjikan harapan besar bahwa ia mampu menghadirkan perbaikan dan perubahan di tubuh kepolisian seperti konsep Presisi yang didengungkannya, yang menjadi jargonnya. Bukan sekadar Kapolri baru, tapi ini baru Kapolri.

Buku ini—yang merupakan sekuel pertama—juga dilengkapi wawancara khusus dengan Kapolri dan hasil survei bekerja sama dengan Paramadina Public Policy Institute dan kegiatan-kegiatan penting Sigit di tahun pertamanya.



**FAROUK ARMAZ** pernah bekerja untuk Jawa Pos, harian berbahasa Inggris *The Jakarta Globe* (JG), *Beritasatu.com/Susra* *Pembaruan*, dan pernah menulis untuk *The Guardian*.

Buku yang ditulis, antara lain: *Menggaspal Ketahanan, Menuju Kedaulatan Pangan Nasional* (2020) dan *Dunia Hoegeng, 100 Tahun Keteladanan* (2021). Dapat dihubungi di [arnasudhin@yahoo.com](mailto:arnasudhin@yahoo.com).

**ILHAM WANCOKO** adalah jurnalis Jawa Pos.

#1  
JALAN PRESISI KAPOLRI

AKSI, REFLEKSI, PANDEMI

FAROUK ARMAZ - ILHAM WANCOKO

“  
Jika kita jatuh bangun dan kemudian jatuh bangun kembali, maka kita bisa belajar untuk bisa menjadi lebih baik.”

Jenderal Listyo Sigit Prabowo



# JALAN PRESISI KAPOLRI



AKSI, REFLEKSI, PANDEMI

INDOSTRATEGIC

paramadina public policy institute



Editor : Farouk Arnaz dan Ilham Wancoko  
 Penyunting Bahasa : Rahastri Fajar Puspasari  
 Foto-foto : M. Ali/Istimewa  
 Penata Letak : Hari Santoso

Hak Cipta dan Penerbit  
 Cetakan : Maret 2022  
 Diterbitkan oleh:  
 Madani Kreatif Yogyakarta

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun keseluruhannya dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam pengutipan untuk keperluan artikel atau karangan ilmiah.



## KATA SAMBUTAN

Oleh: Ketua DPR-RI

**F**ungsi kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Di era keterbukaan informasi saat ini, tuntutan masyarakat terhadap kinerja kepolisian yang andal dan profesional semakin tinggi.

Untuk meningkatkan kinerja kepolisian sesuai harapan masyarakat, membutuhkan berbagai upaya yang terencana, berkesinambungan, dan partisipasi dari seluruh *stakeholder* kepolisian.

Kepolisian yang semakin andal dan profesional, dilakukan melalui transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan transformasi pengawasan.

Partisipasi dari seluruh personel Polri dalam melakukan transformasi merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan transformasi di Polri.

Kapolri ke-26, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, telah menjabarkan konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) kepemimpinannya dalam melaksanakan tugas kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selama

satu tahun pertamanya sebagai Kapolri, tentu telah banyak hal yang dilakukan dalam mentransformasi Polri.

Buku ini dapat memberikan gambaran mengenai kiprah dan komitmen Kapolri untuk meningkatkan kinerja kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Buku ini juga dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak yang terkait untuk memiliki perspektif dalam membangun Polri yang profesional.

Dengan kepemimpinan Polri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo diharapkan dapat menggerakkan seluruh aparat kepolisian untuk kerja bersama dalam mempercepat transformasi dan memajukan Polri.

Polri selalu menjadi andalan dan harapan rakyat untuk dapat memberikan pelayanan kepolisian yang ramah, mudah, cepat, dan profesional.

Selamat bekerja dan terus berkarya.

**Ketua DPR-RI**



**Dr. (H.C.) Puan Maharani**

## PENGANTAR

# Presisi, Pandemi, Refleksi

**"A**da pepatah, ikan busuk mulai dari kepala. Kalau pemimpinnya bermasalah, bawahannya akan bermasalah juga. Pimpinan harus jadi teladan, sehingga bawahannya akan meneladani. Karena kita tidak mungkin diikuti kalau kita tidak memulai yang baik, kita tidak mungkin menegur kalau tidak jadi teladan, harus mulai dari pemimpin atau diri sendiri. Ini yang saya harapkan rekan-rekan mampu memahami. Hal yang dijalankan penuh keikhlasan akan menjadi buah keikhlasan. Tolong ini diimplementasikan bukan hanya teori dan pepatah. Saya dan seluruh pejabat utama memiliki komitmen kepada anggota yang sudah bekerja keras di lapangan, kerja bagus, capek, meninggalkan anak-istri. Akan selalu komitmen berikan reward. Kalau saya lupa, tolong diingatkan. Namun, terhadap anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak pada organisasi, maka saya minta rekan-rekan tidak ragu melakukan tindakan tegas karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau tak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya akan saya potong. Setuju? Tapi saya yakin rekan-rekan mampu semua untuk melaksanakan karena ini semua untuk kebaikan organisasi yang kita cintai."



Demikian perkataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat penutupan pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-30, Sespimen Polri Dikreg ke-61, dan Sespimma Polri angkatan ke-66 di Lembang, Jawa Barat, Rabu 27 Oktober 2021.<sup>1</sup>

Setahun sudah Jenderal Listyo Sigit Prabowo duduk di kursi Kapolri sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2021 lalu. Sejumlah keberhasilan dan prestasi telah ditorehkan oleh mantan Kabareskrim yang dipilih menggantikan Jenderal Idham Azis itu. Sejumlah peristiwa penting juga telah terjadi di 365 hari masa kepemimpinan Sigit yang menjabat sebagai Kapolri ke-26 ini.

Namun, tak semua peristiwa itu—tentu saja—bernada positif. Jalan masih panjang dan pekerjaan rumah masih menumpuk untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas korps baju cokelat yang ia pimpin. Sejumlah isu negatif, untuk tidak menyebut memalukan, menerpa di era kepemimpinannya yang kontan merupakan ujian *leadership* bagi lulusan Akademi Kepolisian angkatan 91 ini.<sup>2</sup>

Terlepas dari hal positif atau negatif itu, bagi editor, Sigit menjanjikan harapan besar bahwa ia mampu menghadirkan

1. Setiap Kapolri selalu mengalokasikan hal-hal ideal yang kurang lebih sama sebenarnya. Misalnya, Kapolri Jenderal Idham Azis yang pernah mengatakan, "Bagi saya satu ketepatan lebih baik daripada seribu nasihat dan kata-kata." Mesalainya, memang bukan soal tata kata, tapi tata perbuatan dan tata implementasi.
2. Salah satu pencapaian positif dalam hal penegakan hukum adalah penangkapan pemimpin Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pada 18 September 2021. Ali Kalora saat itu berhasil ditambak mati oleh Satgas Mandago Raya.
3. Isu negatif yang memuncak dan membuat Polri sempat babak belur adalah munculnya tagar #PermanaLaporPolri di lini masa Twitter pada awal November 2021. Ini dinilai merupakan ekspresi dari akumulasi kekecewaan masyarakat kepada korps baju cokelat itu. Angka kepercayaan pada Polri kontan merosot saat tagar ini merambat.

perbaikan dan perubahan di tubuh kepolisian seperti konsep Presisi yang didengungkannya, yang menjadi jargonnya.<sup>3</sup> Butuh waktu memang, tapi harapan di pundak pada Sigit menggelegak. Ada beberapa hal yang melandasi keyakinan editor mengapa Sigit diyakini bisa menghadirkan harapan itu.

*Pertama*, ia mempunyai kedekatan secara khusus dengan Presiden Joko Widodo sehingga secara matematis ia akan lebih mudah menangkis dan menolak jika ada yang "merezeki" kepemimpinannya dengan membawa-bawa nama penguasa cq kekuasaan.<sup>4</sup> Memang, suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui, sudah jadi rahasia umum jika banyak pihak yang punya kepentingan dengan Polri sehingga otomatis banyak yang punya keinginan untuk ikut campur tangan ke dalamnya.

*Kedua*, Sigit bisa jadi dipercaya dan akan terus menjabat sebagai Kapolri hingga 2024 bersama dengan akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo.<sup>5</sup> Jika skenario ini terjadi, maka Sigit mempunyai masa bakti sebagai Kapolri hingga 4 tahun padahal masa jabatan Kapolri biasanya hanya 2-3 tahun.<sup>6</sup> Ibaratnya, Sigit akan punya cukup waktu untuk "mengolah tanah dengan mencabut gulma, memilih dan menanam bibit terbaik, merawat dan memupuk, hingga masa

4. Presisi adalah kependekan dari *Predikat, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan*.
5. Sigit sudah kenal dan bersama-sama dengan Jokowi sejak ia menjabat Kapolresta Solo pada 2011 silam. Saat itu Jokowi adalah Wali Kota Solo dan mereka bertua bekerja bersama-sama membangun kota termasuk meredakan ketegangan warga Solo pasca kasus bom bunuh diri di Gereja Tegal Jati Sepuluh (GTS), Kapulon.
6. Jabatan Kapolri adalah merupakan hak prerogatif Presiden. Jadi, tidak ada pakem pasti berapa lama seseorang menjabat Kapolri dan tidak selalu harus mengakhiri masa pensiun yang bersangkutan. Pascareformasi bahkan ada Kapolri yang hanya menjabat selama 10 bulan dan harus berhenti karena pensiun yaitu di era Kapolri Jenderal Idham Azis.
7. Andai jabatan Sigit sebagai Kapolri berakhir pada 2024 dan ia tidak dipaka lagi oleh Presiden berikutnya, maka Sigit masih akan bekerja sebagai anggota Tim Gabung Sigit baru penasih pada 2027. Ia memang Kapolri termuda pascareformasi yang diangkat saat masih berusia 51 tahun. Di masa lalu ada Kapolri yang diangkat lebih muda lagi misalnya Jenderal Hoegeng Iman Samud yang jadi Kapolri saat umur 48 tahun.



”

Seorang Kapolri yang mempunyai keluarga di kepolisian sering kali “tersandera” karena kerap memikirkan mereka baik pada saat ia masih menjabat dan pensiun kelak

panen sesuai harapan” di kepolisian.<sup>8</sup>

Ketiga, hingga sejauh ini, Sigit tidak punya anak dan mantu bahkan besan yang berdinasti di kepolisian. Seorang Kapolri yang mempunyai keluarga di kepolisian sering kali “tersandera” karena kerap memikirkan mereka baik pada saat ia masih menjabat dan pensiun kelak.<sup>9</sup> Akibatnya, ia tidak bisa terlalu tegas dan bahkan tergoda memberikan *privilege* buat anak, mantu, dan besannya itu. Akhirnya jalan yang diambil adalah jalan kompromi dengan memperbanyak kawan di internal.<sup>10</sup>

Keempat, gaya hidup Sigit dan keluarga relatif tidak neko-neko dan glamor. Hampir tiap narasumber yang mengenal keluarga Sigit dan editor jernih memberi acungan jempol untuk keluarganya yang hidup bersahaja. Tak selalu harus menggunakan merek-merek wah yang mahal. Sigit juga tak tampak mengenakan jam tangan mahal.

- 8 Saat Sigit diangkat sebagai Kapolri, Sigit mendiangkahi empat angkatan Akpol di atasnya, tidak yang jadi tantangan terbesar Sigit dalam menjalankan roda organisasi. Untuk dicatat hubungan senior-junior di kepolisian amat kental sehingga Sigit harus bisa menempatkan diri dengan tak karena ia kini memimpin para senionnya, ia harus bisa memastikan roda organisasi tidak berak dengan memilih orang-orang (khususnya senior di tahun pertamanya menjabat sebagai Kapolri) yang terbaik.
- 9 Sigit mempunyai tiga orang anak kandung dan beberapa orang anak yatim yang diangkat menjadi anak. Dari tiga anak kandungnya itu baru satu yang menikah yaitu Cornelius Krishna Satya Patra Yandhana yang menikah 2018 silam. Krishna berprofesi sebagai dokter.
- 10 Seorang Kapolri bisa jadi gamang dalam bertindak tegas dan keras karena ia bisa jadi takut jika ia pensiun kelak maka anak, mantu, dan bahkan besannya bisa jadi akan dijersit kariernya.

Atas setidaknya empat variabel—yang mungkin terdengar sederhana—di atas itulah, editor percaya Sigit bisa dan mampu, serta ia punya banyak kesempatan untuk meninggalkan *legacy* sebagai Kapolri yang akan dikenang sepanjang masa sebagaimana halnya—meski pasti berbeda—misalnya dengan mendiang Jenderal Hoegeng yang baru saja “merayakan HUT” ke-100 tahun pada 14 Oktober 2021 silam.

Pendek kata Sigit punya banyak modal untuk mewujudkan cita-cita bersama itu: memiliki Polri idaman yang menjadi salah satu bangunan penting yang diuntungkan dalam arsitektur utama di era demokrasi.<sup>11</sup> Polisi yang melayani, melindungi, dan mengayomi. Bukan sekadar polisi yang membebek dan memberi pelayanan pada kekuasaan yang sejatinya ternyata membuat Presiden Joko Widodo tidak nyaman.<sup>12</sup>

Pemerintahan Joko Widodo memang sadar betul pentingnya peran polisi dalam tertib sipil. Lihat saja politik anggarannya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada 2022 ini di mana Polri digelontor Rp 111,02 triliun. Nilai tersebut meningkat 14,6% dibandingkan *outlook* APBN 2021

- 11 Ini sebagaimana dirujuk dan buku *Democratic Policing* (2017) yang mengutamakan pentingnya konsep pemolisian yang demokratis di Indonesia. Buku yang ditulis Jenderal Tito Karnavian dan Hermawan Sulatyo menulis, “Yang jelas polisi Polri mendukung demokrasi. Karena memang Polri diuntungkan (oleh proses demokrasi itu).” Sehingga harapannya polisi bisa menghindari jebakan demokrasi yaitu suatu keadaan di mana pemerintahan terpilih justru mendatangkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
- 12 Saat memberi pengarahannya kepada Kepala Kasatam Wilayah (Kasatwil) tahun 2021 di Bali, Jumat, 3 Desember 2021, Presiden menyoroti survei BPS yang menunjukkan indeks kebebasan berpendapat yang terus menurun dan 66,2 persen pada 2018, 64,3 persen pada 2019, hingga menjadi 56 persen pada 2020. Salah satu sebabnya menurut Presiden adalah begitu reaktifnya anggota polisi di lapangan menangkap mereka yang mengungkap kritik termasuk melalui media.



yang sebesar Rp 96,88 triliun.<sup>13</sup>

Anggaran jumbo untuk Polri ini—yang mempunyai sekitar 450 ribu personel—membuat Polri duduk menempati posisi kedua. Posisi pertama yang mendapatkan anggaran terbesar ditempati oleh Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran Rp 133,9 triliun yang mana angka tersebut naik dari *outlook* tahun ini Rp 118,19 triliun.<sup>14</sup>

Hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah kinerja tahun pertama Sigit terjadi di masa pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir. Banyak hal yang dilakukan polisi dalam kondisi khusus ini—sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya saja vaksinasi, kampanye pemakaian masker, mengawal dan mengubur jenazah positif Covid-19 yang pemakamannya ditolak, sebagian kecil masyarakat, membuat dapur umum, bantuan sosial, karantina, membubarkan kerumunan, hingga penyemprotan disinfektan.

Polisi juga aktif menindak hal-hal yang sifatnya menghalangi penerapan protokol kesehatan, penimbunan masker, pemalsuan *hand sanitizer*, menjaga alur distribusi obat Covid-19, tabung oksigen, serta menghentikan hoaks dengan menerapkan sejumlah UU termasuk UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

<sup>13</sup> <https://data.bka.koradata.co.id/data/publish/2021/08/18/alokasi-anggaran-polri-dalam-rupe-2022-nab-148>

<sup>14</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada di posisi ketiga dengan alokasi anggaran Rp 190,56 triliun, Kementerian Kesehatan duduk di nomor empat dengan alokasi anggaran Rp 96,06 triliun. Angka ini turun drastis dari *outlook* tahun 2021 yang sebesar Rp 175,94 triliun. Sementara posisi kelima diisi oleh Kementerian Sosial atau Kemensos dengan alokasi anggaran Rp 78,26 triliun. Dari sisi kebijakan anggaran, kita bisa melihat bagaimana vital dan pentingnya polisi saat ini. <https://bisnis.lampara.com/1496630/1-5-kementerian-dan-lembaga-negara-dengan-anggaran-tertinggi-6-2022/1496630>

”

Bencana dapat memicu berkembangnya *corrosive community* yang potensial menjadi lahan subur tumbuhnya konflik, trauma yang berkelanjutan, dan gangguan sosial (Frailing and Harper, 2017).

Polisi menyadari bila bencana, termasuk pandemi, merupakan *criminogenic situation* yang bisa memicu tindakan antisosial dan kejahatan. Bencana dapat memicu berkembangnya *corrosive community* yang potensial menjadi lahan subur tumbuhnya konflik, trauma yang berkelanjutan, dan gangguan sosial (Frailing and Harper, 2017).

Untuk itu, jika bencana dibiarkan dan tidak tertangani oleh departemen dan kementerian terkait, maka pada akhirnya itu akan menjadi beban polisi juga karena berpotensi memicu gangguan keamanan. Hingga polisi akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan pencegahan agar pandemi itu tidak memburuk dan tampil di depan bersama TNI.

Untuk itulah buku ini, yang merupakan inisiatif murni editor, hadir dan digarap sejak November. Editor pernah hampir 20 tahun meliput isu-isu kepolisian khususnya *ngempos* di Mabes Polri sehingga otomatis merasakan dan bersentuhan langsung dengan Sigit di tahun awal kepemimpinannya sebagai Kapolri<sup>15</sup>. Sigit

<sup>15</sup> Saat pengerjaan buku ini ada beberapa peristiwa menjadi satu kasus perboks apartor dengan warga di Wadas, Jawa Tengah dan penarikan demonstrasi di Pang Moutang, Sulawesi Tengah.

Lalu dua polisi terdakwa penembakan laskar FPI di Bekasi ditangkap dan Direktur Lukadati Hani Azhar dan Koordinator KontraS Fata Maulid yang ditangkap sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Mervin Marves Luhut Binsar Panjaitan. Namun karena terjadi setelah setahun masa kepemimpinan Sigit, peristiwa di atas itu belum masuk di buku ini.



dikenang selalu bertutur kata halus dan lembut seperti orang Solo pada umumnya kendati lahir di Ambon. Ia bahkan relatif irit dan jarang bicara ke media.<sup>16</sup>

Perjalanan panjang editor meliput di lingkungan Polri di era pascareformasi itulah yang mendorong dan memberanikan editor untuk mengumpulkan dan menyajikan catatan ini yang diharapkan bisa bermanfaat dan digunakan sebagai sarana bacaan dan refleksi. Sarana berkaca yang konstruktif, bukan merusak. Semacam tradisi baru memberi rapor untuk Kapolri sebagai hadiah ulang tahun kepemimpinannya.

Tahun 2022 ini juga penting karena di tahun ini UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian berusia dua dasawarsa.<sup>17</sup> UU ini mengatur jika Polri berada di bawah Presiden secara langsung dan dipisah dengan TNI, Polri bertanggung jawab dalam keamanan dan ketertiban, sedangkan TNI bertanggung jawab dalam bidang pertahanan.

Selain pemisahan tersebut, dalam UU itu disebutkan jika Kapolri bertanggung jawab langsung pada Presiden dibanding sebelumnya yang di bawah Panglima ABRI, pengangkatan Kapolri juga harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, dan dibuatnya Komisi Kepolisian Nasional (Kopominas) untuk

16. Selain dengan Sigit, editor juga merasakan dan bersentuhan dengan delapan Kapolri lain yang secara berurutan, yaitu Jenderal Dwi Bachjar, Jenderal Sulanta, Jenderal Bambang Hendoko Damu, Jenderal Timur Pradopo, Jenderal Sutarmam, Jenderal Badrodin Haiti, Jenderal Tir Karnawan, dan Jenderal Idham Aziz. Sigit adalah Kapolri ke-26 dalam sejarah Polri.

17. UU 2/2002 ditandatangani pada tanggal 8 Januari 2002 oleh Presiden Megawati Sukarnoputri. Pada tahun 2022 ya Polri akan kerap berusia 76 tahun.

membantu Presiden membuat kebijakan dan memilih Kapolri.<sup>18</sup>

Buku ini berisi kumpulan tulisan sejumlah tokoh yang dipilih editor melalui pertimbangan matang setelah berdiskusi dengan sejumlah pihak. Bukan sekadar buku yang berisi sarana puja-puji dan *make up*. Bukan buku *branding*. Hal yang baik harus dipertahankan dan ditingkatkan, sementara hal yang masih buruk perlu ditingkatkan. Sebab, sejatinya Polri bukan milik perorangan, tapi Polri adalah milik kita semua.

Sehingga kalau polisi jelek, maka yang merasakan sakit atas dampaknya juga semua pihak: masyarakat pada umumnya dan pasti juga internal Polri itu sendiri. Sebab, masih banyak kebaikan di tubuh kepolisian. Tapi wajib diingat di mana-mana konsumen adalah raja yang ekspektasinya terus meningkat dan harus selalu diservis dengan ekzellen—dan Sigit punya waktu untuk memperbaiki kekurangan internalnya itu. Masyarakat boleh berubah dan dinamis, tapi janji dan sumpah jabatan seorang polisi akan tetap sama dari dulu, hari ini, dan nanti.

Hal lain dalam catatan editor, dalam rajutan kebhinekaan, Sigit adalah sebuah tradisi baru karena ia adalah Kapolri kedua nonmuslim setelah Kapolri Jenderal Widodo Budidarmo di era 1974-1978.<sup>19</sup> Selama ini memang seolah ada peraturan tak tertulis jika seorang Kapolri harus muslim mengingat mayoritas warga negara kita beragama Islam. Untuk itu, Sigit seolah diberi

18. Hal lain dalam UU ini adalah Polri dilarang terlibat dalam politik praktis serta dihilangkan hak pilih dan dipilih, harus tunduk dalam peradilan umum—dan sebelumnya melalui peradilan militer. Internal kepolisian sendiri pun memulai reformasi internal dengan dilakukan demobilisasi kepolisian dengan menghilangkan corak militer dari tubuh Polri. Agak diluaran perubahan paradigma angkatan perang menjadi masuk ke penegak hukum profesional yang menerapkan hak asasi manusia, diharapkan Fraksi ABRI (kemudian Polri) dan DPR, perubahan doktrin, pelatihan dan landa kepangkatan Polri yang sebelumnya sama dengan TNI, dan lainnya. Reorganisasi Polri pascareformasi belakangan diatur dalam Perpres No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia.

19. Baca: buku Widodo Budidarmo, *Serius Karena Kuasa & Nasibnya* (2004).



tantangan tambahan dan ia harus membuktikan bahwa latar belakang kepercayaan seorang Kapolri, termasuk dirinya, bukan hambatan untuk jadi Kapolri yang punya warna dan membekas.

Buku ini juga dilengkapi dengan catatan harian dan kegiatan Sigit selama setahun kepemimpinannya yang dijahit dan dikumpulkan dari berbagai media massa. Perintah-perintah presiden kepada Kapolri juga berisi hasil survei sejumlah elit yang bisa digunakan secara kualitatif bekerjasama dan berkolaborasi dengan Ahmad Khoirul Umam, PhD dari Paramadina Public Policy Institute.<sup>20</sup>

Terdapat juga wawancara mendalam dengan Sigit yang menjadi lahan dalam cerita ini. Untuk itu editor sampaikan ucapan yang sebesar-besarnya pada Kapolri dan jajarannya yang memberi kesempatan pada editor. Juga kepada para narasumber yang bersedia mengizinkan tulisannya atau diwawancarai, serta rekan-rekan dan tim di balik layar yang membantu lahirnya buku ini khususnya pada Ihan Wancoko yang bertindak sebagai *co-writer*.

Berharap buku ini juga mendapat ruang dalam diskusi catatan tentang kepemimpinan pejabat publik khususnya di tubuh kepolisian. Juga berharap buku ini dapat menjadi peleton semangat dalam pengabdian dan tidak berpuas diri.

*Akhirkalimat* tentu saja buku yang digarap sekitar tiga bulan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu editor meminta maaf yang sebesar-besarnya. Termasuk apabila buku ini dianggap belum mampu merekam semua hal terkait Jalan Presisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Selamat membaca

Jombang, 30 November 2021

<sup>20</sup> Umam adalah rekan editor saat ia dulu masih bekerja sebagai reporter Jawa Pos di era 2000-an.

## DAFTAR ISI

Sambutan Ketua DPR RI.....	III
Pengantar.....	V
<b>BAGIAN 1</b>	
<b>Catatan Para Tokoh.....</b>	<b>1</b>
1. Setahun Bersama Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Marsekal (Pur) Hadi Tjahjanto) .....	3
2. Alat Masyarakat Sipil untuk Negara yang Demokratis (Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid) .....	11
3. Senior yang Tak Antikritik (Novel Baswedan) .....	23
4. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Pekerjaan Rumah dan Hak Asasi Manusia (Poengky Indarti) .....	33
5. Polisi vs Tagar dan HAM (Amiruddin al-Rahab) .....	45
6. Kontradiksi Slogan Presisi, Perlunya Reformasi (M. Fariz Amrullah) .....	65
7. Polri, Pandemi, dan Tanggung Jawab Bersama (dr. Slamet Budiarto, SH, MH, Kes) .....	75
8. Pak Kapolri, Usut Tuntas Pembunuhan Kakak Saya! (Ernawati H. Bakkarang) .....	83
9. Nilai 7 untuk Setahun Rapor Kapolri (Arif Zulkiffi) .....	91
10. Pak Sigit Mencuit, Polri Makin Mendengar (Audrey Santoso) .....	99



<b>BAGIAN 2</b>	
<b>Setahun Sigit Dalam Survei</b> .....	109
Reformasi Polri & Jalan Terjal Mewujudkan Keadilan.....	111

<b>BAGIAN 3</b>	
<b>Jejak Langkah Sigit</b> .....	145
365 Hari Memimpin Korps Bhayangkara.....	147
Setahun Kinerja Kapolri.....	151

<b>BAGIAN 4</b>	
Kapolri Menjawab, Kita Berharap.....	173

“

Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan

Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi

darta bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Tribrata.” kata Presiden Joko Widodo saat membacakan sumpah jabatan yang diikuti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

”

(Istana Negara, Jakarta, 27 Januari 2021)



## Reformasi Polri & Jalan Terjal Mewujudkan Keadilan

Catatan Setahun Kinerja Kapolri  
 Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Oleh **Dr. Ahmad Khoirul Umam**

Dosen Ilmu Politik & International Studies, Universitas Paramadina &  
 Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Jakarta

Tanggal 27 Januari lalu merupakan momentum setahun kepemimpinan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Ia dilantik Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal Pol. Idham Azis yang purna tugas setahun sebelumnya. Di tengah kian menumpuknya catatan publik tentang tren kemunduran demokrasi dan politisasi instrumen hukum negara (Power, 2018; Mujani, 2021; *Economist Intelligence Unit*, 2020; Umam, 2021), kepemimpinan Jenderal Sigit diharapkan mampu menghadirkan perubahan signifikan terhadap watak penegakan hukum, stabilitas keamanan nasional, dan juga pematangan kualitas demokrasi di tanah air.

Tentu tidak mudah bagi Jenderal Sigit untuk menjawab semua tantangan dan harapan publik terhadap perubahan karakter lembaga Polri. Ketidakmampuan Kapolri untuk menjawab tantangan publik bisa berimplikasi pada kian melemahnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat (*approval rate*) terhadap



kinerja Polri. Sebaliknya, jika Kapolri mampu mengoptimalkan kapasitas kepemimpinannya untuk menavigasi proses perubahan di Polri secara kelembagaan, maka hal itu akan berdampak positif terhadap meningkatnya kepercayaan publik terhadap Polri, sekaligus kian terkikisnya *stereotype* yang selama ini seolah melekat pada kinerja Polri sebagai instrumen penegak hukum yang cenderung "tebang pilih", rentan politisasi, sarat keberpihakan, atau bahkan praktik kriminalisasi. Tentu Jenderal Sigit paham betul kepercayaan masyarakat yang dibangun di atas pembuktian komitmen dan kerja nyata merupakan fondasi utama bagi seorang *leader* untuk mewujudkan visi kepemimpinan yang diamanahkan kepadanya (Bass, Avolio, Jung & Berson, 2003; Northouse, 2016).

Selama ini, perhatian dan harapan masyarakat terhadap perubahan kinerja Polri cenderung terfokus pada lima aspek mendasar. *Pertama*, hadirnya watak penegakan hukum yang betubuh, betal, independen, profesional, dan imparisial. Untuk mewujudkan itu, dibutuhkan upaya penguatan integritas kelembagaan dan personil Polri. Karena itu, reformasi struktural dan kultural di tubuh Polri harus benar-benar dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan. Reformasi struktural dan kultural di tubuh personil maupun pejabat tinggi kepolisian merupakan agenda lintas generasi, mengingat profesionalitas Polri merupakan prasyarat bagi hadirnya stabilitas politik, keamanan hingga pembangunan ekonomi negara yang mapan. Dengan bekal anggaran sebesar Rp 111 triliun pada 2022, meskipun sedikit turun dibanding tahun 2021 sebesar Rp 131,643 triliun, namun angka itu relatif jauh lebih besar dibanding kementerian dan lembaga negara lainnya. Besarnya alokasi anggaran Polri di APBN 2022 itu diharapkan bisa menjadi bekal memadai untuk menyemai nilai-nilai integritas personil, memperbaiki kualitas layanan publik, serta menghadirkan sistem penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel (*good governance in law enforcement*).

*Kedua*, meningkatkan kualitas fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, utamanya pada aspek perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Dalam konteks ini, personil Polri dilapangan juga perlu dibekali literasi sosial-politik yang memadai, agar mereka yang berada di garis terdepan berinteraksi dengan rakyat tidak salah sikap dan langkah dalam memperlakukan rakyat. Tragedi polisi salah tembak, salah tangkap, bebas mengeksploitasi wilayah privasi rakyat yang konon demi "kemanan negara", hingga memukul atau bahkan membanting mahasiswa tak bersenjata yang sedang demonstrasi sebagai wahana mereka latihan berdemokrasi, hingga tak sadarkan diri, tak boleh terulang. Dibutuhkan kemampuan komunikasi publik yang matang dan memadai sebagai bekal untuk mengutamakan langkah-langkah preventif saat berhadapan dengan anak bangsa sendiri. Dengan demikian, instabilitas politik dan keamanan seperti yang belakangan terjadi di Papua hingga Maluku, bisa lebih mudah diatasi dengan semangat bersama untuk merawat fondasi persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi itu sendiri.

*Ketiga*, meningkatkan profesionalitas Polri dalam memberantas dan mencegah radikalisme, terorisme, hingga peredaran narkoba di Tanah Air. Fenomena radikalisme, terorisme, dan pidana narkoba terus mengalami perkembangan signifikan. Aktor, strategi, dan metode pidananya terus mengalami transformasi dan perubahan. Untuk itu, dibutuhkan kewaspadaan internal dan koordinasi antarotoritas lintas negara untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini, langkah mitigasi, dan proses rehabilitasi yang tepat dan memadai. Dalam konteks radikalisme, menguatnya paham-paham keagamaan yang radikal-konservatif versus hiper-nasionalis juga seolah memperparah situasi hingga membuka ruang perdebatan teologis yang semakin tidak produktif. Pertentangan mereka terus masuk terselubung dalam ruang politik demokrasi yang terbuka, hingga membangkitkan narasi-narasi Islamis versus Nasionalis, Pancasilais versus Agamis, *Harbi* versus *Dzimmi*, *Thoghut* versus Islami, dan lainnya. Polri harus menjaga semua ini dengan berkolaborasi dengan seluruh kekuatan Islam moderat di Tanah Air, utamanya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sebagai pilar utama penjaga pilar



”

Secara general, praktik korupsi di tubuh lembaga kepolisian di berbagai negara dipengaruhi oleh beragam faktor budaya, organisasi, birokrasi, hingga karakter politik masing-masing negaranya.

*Islam Ahlusunnah Wal Jamaah yang berkarakter Rahmatan Lil Alamun, yang bercorak moderat (tawasuth), toleran (tasamuh) dan seimbang (tawazun) di Tanah Air.*

*Keempat*, meningkatkan kapasitas dan integritas Polri dalam penanganan tindak pidana korupsi yang notabene merupakan bagian integral dari amanah Reformasi 1998. Perhatian masyarakat terkait hal ini tentu beraiasan kuat. Sebab praktik korupsi yang melibatkan elemen kepolisian menjadi tren umum yang terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga terjadi di berbagai negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik (Larmour dan Wolanin, 2009; Rose-Ackerman, 1999). Secara general, praktik korupsi di tubuh lembaga kepolisian di berbagai negara dipengaruhi oleh beragam faktor budaya, organisasi, birokrasi, hingga karakter politik masing-masing negaranya. Dalam konteks Indonesia, sebagaimana pernah dielaborasi oleh Bambang Widodo Umar (2013), upaya pemberantasan korupsi di tubuh lembaga kepolisian perlu diarahkan pada korupsi internal (*internal corruption*) terkait suap dalam layanan publik, jual beli jabatan, suap dalam proses rekrutmen personel kepolisian, suap terkait pendidikan untuk promosi jabatan struktural di internal kepolisian, hingga korupsi anggaran dan logistik di masing-masing bagian. Selain itu, Umar (2013) juga menekankan pentingnya menekan praktik korupsi eksternal (*external corruption*) yang meliputi praktik “negosiasi ilegal” dalam proses penegakan hukum, baik terkait penetapan status saksi, terperiksa,

hingga tersangka dalam kasus-kasus skandal korupsi kecil (*petty corruption*) ataupun korupsi besar (*state-captured corruption*) yang melibatkan nama besar (*big names*), uang besar (*big money*) dan juga kekuasaan besar (*big power*). Yang mana semua itu membuka ruang praktik manipulasi dan politisasi yang tidak dibenarkan oleh aturan hukum dan norma keadilan itu sendiri. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas internal Polri dan juga kemampuan untuk meningkatkan fungsi koordinasi dan supervisi dengan lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga diharapkan terus meningkat. Jika Polri bersih, tentu Indonesia semakin bersih.

*Kelima*, benar-benar mampu menjaga netralitas politik dan mendorong konsolidasi demokrasi. Belakangan ini, sejumlah kalangan masyarakat sipil menilai Polri menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap melemahnya kebebasan sipil (*civil freedom*) yang menjadi fondasi utama demokrasi. Dalam konteks ini, masyarakat betul-betul mengharapkan independensi dan profesionalitas Polri dalam mengayunkan pedang keadilan yang diamanahkan rakyat melalui konstitusi kepada lembaga ini. Karenanya, profesionalitas itu salah satunya bisa diwujudkan dalam upaya pengamanan *cyber-space* dan ruang digital yang belakangan semakin liar dan tidak mencedaskan. Selain mulai disesaki berbagai praktik kejahatan siber seperti pembobolan akun, kejahatan perbankan, atau eksploitasi identitas pribadi, ruang digital kita juga disesaki oleh materi-materi pembodohan yang berwujud *hoax*, *fake news*, *hate speech*, hingga *character assassinations* yang mengeksploitasi isu identitas, suku, ras, dan agama (SARA). Semua itu mengaduk-aduk emosi rakyat dan membuat rakyat terbelah, terpolarisasi, hingga mengancam stabilitas perdamaian di akar rumput. Jika Polri mampu menertibkan semua benalu demokrasi tersebut, Polri akan semakin dihormati dan dicintai rakyat sebagai pengawal proses demokrasi yang matang. Memang, upaya penciptaan ketertiban sosial membutuhkan komitmen dan pembuktian.



### Langkah Awal Kapolri yang Progresif

Berangkat dari lima catatan utama yang selama ini membayang persepsi masyarakat terhadap kinerja Polri, maka bisa dipahami bahwa setiap hadirnya pimpinan baru di tubuh Polri akan selalu membuka ruang harapan yang sangat besar bagi hadirnya perubahan di tubuh Polri itu sendiri. Tentu hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang yang baik bagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengoptimalkan amanah yang diembannya untuk menghadirkan keteladanan serta warisan kepemimpinan (*legacy of leadership*) yang baik dan inspiratif.

Sejauh ini, berdasarkan pengamatan terhadap mayoritas lembaga survei di Tanah Air, tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Polri terus mengalami peningkatan yang progresif (LSI, 2021; Indikator Politik, 2021; IndoStrategic, 2021). Bahkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri berhasil melampaui tingkat *approval rate*-nya KPK yang selama ini menjadi lembaga idola dan paling dipercaya masyarakat. Tentu fenomena ini cukup unik dan memunculkan pertanyaan besar di kalangan peneliti. Apakah tren peningkatan tingkat kepuasan publik dan kepercayaan publik terhadap lembaga Polri hingga melampaui KPK ini memang disebabkan oleh betul-betul kian solidnya kinerja Polri, masifnya strategi *branding* dan promosi Polri, atau konsekuensi lain atas jatuhnya kepercayaan publik terhadap lembaga KPK hingga membuka ruang mobilitasi vertikal bagi penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri?

Terlepas dari itu, satu tahun kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memang mampu memunculkan sejumlah catatan positif yang cukup efektif mempengaruhi cara pandang publik terhadap kinerja Polri. Misalnya, *pertama*, instruksi Kapolri Jenderal Sigit terkait pengarusutamaan *restorative justice* dalam penanganan perkara UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016, termasuk terkait kasus-kasus pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan. Kapolri menerbitkan surat edaran pada tanggal 19 Februari 2021 yang salah satunya menginstruksikan para penyidik

”

Sikap Kapolri yang memberikan ruang masyarakat untuk menyampaikan kritik di tengah kritikan masyarakat sipil yang menilai Polri ikut bertanggung jawab dalam proses pelemahan kebebasan sipil di tanah air, juga berkontribusi menggeser penilaian kritis tersebut.

Polri untuk menjolankan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat peradilan, yakni dengan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk menemukan solusi, kesepakatan damai dan kembali membangun relasi sosial yang baik, tanpa harus menggunakan jalan hukum. Langkah ini patut diapresiasi, meskipun harus kembali dicermati kembali seberapa efektif instruksi Kapolri ini dijalankan oleh para penyidik di berbagai tingkatan.

*Kedua*, ketegasan Kapolri Jenderal Sigit untuk menindak para pimpinan Polri di berbagai tingkatan yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional. Statemen Kapolri yang menyatakan bahwa “jika tak mampu bersihkan ekor, kepalanya saya potong” (27/10/2021) benar-benar mampu menghadirkan kesan tegas dan komitmennya untuk mendorong struktur Polri bekerja secara adil, independen, dan profesional. Statemen Kapolri itu tetap ditantang oleh masyarakat dengan hadirnya sejumlah narasi kritis di media sosial yang menyatakan “Jika Tak Viral, Tak Ada Keadilan” sebagai ekspresi protes masyarakat terhadap pola kerja Polri yang terkesan hanya reaktif terhadap *public mood* yang didominasi isu-isu dalam percakapan masyarakat semata. Kendati demikian, Kapolri tetap berusaha membuktikan komitmennya dengan langkah cepat lewat peringatan, pencopotan, hingga mutasi yang seringkali diatasnamakan *tour of duty and tour of area*.



Ketiga, menegaskan Polri tidak antikritik. Sikap Kapolri yang memberikan ruang masyarakat untuk menyampaikan kritik di tengah kritikan masyarakat sipil yang menilai Polri ikut bertanggung jawab dalam proses pelemahan kebebasan sipil di tanah air, juga berkontribusi menggeser penilaian kritis tersebut. Instruksi Kapolri Jenderal Sigit kepada jajarannya untuk menjaga wibawa institusi, menegakkan rasa keadilan publik, dan memberikan pelayanan yang sama kepada masyarakat kecil juga mendorong persepsi positif bagi lembaga Polri. Kendati demikian, nilai baik Kapolri ini diharapkan masyarakat tidak hanya sekadar gimmick seorang pemimpin yang harus menjadi "a good and lovely man", tetapi benar-benar harus bisa dibuktikan dalam efektivitas instruksinya di semua tingkatan dalam jajaran struktur kepolisian.

Untuk menguji sejauh mana implikasi positif dari kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menavigasi arah perubahan dan perbaikan di tubuh Polri tersebut, maka *Paramadina Public Policy Institute (PPPI)* bekerja sama dengan *Institute for Democracy and Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC)* menyelenggarakan survei elite (*elite survey*) untuk mengevaluasi dan menilai kinerja Polri selama satu tahun terakhir di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (Januari-Desember 2021).

#### Metodologi

Survei elite ini bersifat independen, nonprofit, dan tanpa bantuan sponsor pihak tertentu yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan (*conflict of interests*). Dengan menggunakan metode *non-probabilistic random sampling* atau *purposive sampling* survei ini yang dilakukan pada 1-24 Desember 2021, menarget 100 orang responden dari kalangan *stakeholders* dan masyarakat sipil (*civil society*) yang dinilai memiliki pengetahuan dan kapasitas memadai untuk menilai kualitas Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Para

responden yang terkategori *purposive sampling* itu meliputi kalangan akademisi-peneliti, aktivis LSM, jurnalis, pengurus Ormas, *policy advisors*, dan juga termasuk representasi pemerintahan eksekutif dan legislatif. Dengan menggunakan skema survei elite yang notabene bukan survei opini publik, langkah ini diharapkan bisa memberikan hasil evaluasi yang lebih memadai dan genuine untuk menilai kebijakan, pendekatan, serta efektivitas kerja Polri di Indonesia secara netral, independen, dan tidak bias oleh faktor-faktor kedekatan dan afiliasi partai politik (*partisanship*).

#### Temuan Survei

Secara general, dengan mencermati penilaian responden yang terdiri atas kelompok kelas menengah terdidik kita, hasil survei ini menunjukkan bahwa kecenderungan responden yang merasa PUAS dan TIDAK PUAS terhadap kinerja Polri selama satu tahun ini di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo relatif cukup berimbang, yakni sebesar 48,3% cenderung PUAS dan 48,3% cenderung TIDAK PUAS. Selanjutnya, dari prosentase mereka yang merasa PUAS, sebanyak 37,2% responden berasal karena kinerja Polri lebih responsif dalam melayani aduan masyarakat. Sementara itu, bagi mereka yang merasa TIDAK PUAS, mayoritas (51,2%) merasa bahwa kinerja Polri setahun belakangan ini kurang adil dalam menegakkan hukum di masyarakat.

Selanjutnya, ketika responden ditanya apakah mereka mengetahui tentang program kerja Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang dicanangkan oleh Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, sebesar 58,4% responden TAHU tentang program kerja Presisi. Sementara itu, bagi mereka yang tahu, sebesar 49,1% responden yang tahu mengenai program Presisi merasa PUAS dengan pelaksanaan program tersebut.

Sementara itu, ketika instrumen survei ini mulai lebih detail berusaha menanyakan kualitas kinerja Polri dalam bidang tertentu,



Jawaban responden juga cukup variatif. Misalnya, ketika responden ditanya bagaimana kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menangani tindak pidana Terorisme di Indonesia setahun belakangan ini, sebesar 60,6% responden cenderung merasa PUAS terhadap kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menangani tindak pidana terorisme di Indonesia setahun belakangan ini. Dari responden yang merasa PUAS tersebut, ada sebanyak 37,0% responden yang menilai di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Polri lebih efektif dalam menjalankan langkah pencegahan tindak terorisme. Sementara itu, 29,2% responden yang merasa TIDAK PUAS dengan kinerja Polri dalam menangani tindak pidana terorisme setahun belakangan ini menilai bahwa di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Polri kurang mampu memutus rantai jaringan terorisme dalam dan luar negeri.

Sementara itu, terkait tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sebesar 61,8% responden cenderung merasa TIDAK PUAS dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Dari mayoritas responden yang merasa tidak puas dengan kinerja Polri dalam menangani tindak pidana KKN itu, ada sekitar 36,4% responden menilai proses hukum dalam penanganan tindak pidana KKN yang ditangani Polri cenderung tidak netral, transparan, dan independen. Tentu hal ini menjadi catatan kritis-konstruktif bagi kinerja Polri di saat pengakuan masyarakat terhadap profesionalisme Polri dalam menangani tindak pidana terorisme cukup tinggi.

Adapun penilaian cukup berimbang muncul terkait dua hal yakni terkait penanganan Polri terhadap kasus Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dan juga penanganan fenomena buzzer, peredaran hoax, dan praktik kejahatan siber. Ketika responden ditanya tentang kualitas penanganan Polri terhadap kasus Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua selama setahun belakangan ini, jawaban responden cenderung berimbang. Di mana mereka yang merasa PUAS (51,6%) dan TIDAK PUAS (48,4%) hanya selisih

tipis. Sementara itu, terkait dengan penilaian terhadap kinerja Polri dalam menangani fenomena buzzer, peredaran hoax, dan praktik kejahatan siber, sebesar 50,6% responden cenderung merasa TIDAK PUAS dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menangani fenomena buzzer, peredaran hoax, dan praktik kejahatan siber setahun belakangan ini.

Sementara itu, terkait dengan layanan SIM Online, sebesar 60,7% responden cenderung merasa PUAS dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menjalankan program layanan SIM ONLINE setahun belakangan ini. Selain itu, ada sebesar 57,3% responden yang juga merasa PUAS dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menjalankan program layanan TILANG ONLINE setahun belakangan ini.

Adapun terkait dengan langkah progresif Kapoti yang merekrut para mantan pegawai KPK yang diberhentikan dengan dalih tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), sebesar 65,2% responden cenderung SETUJU dengan langkah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang mengangkat 52 mantan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tersebut sebagai ASN Polri.

Selanjutnya, terkait dengan momentum politik menuju pesta demokrasi 2024, sebesar 49,5% responden cenderung YAKIN dengan netralitas dan independensi Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menghadapi Pemilu 2024. Sementara itu, sebesar 50,6% responden juga cenderung YAKIN terhadap komitmen politik (political will) Presiden Joko Widodo dalam memperkuat kapasitas, profesionalitas, independensi, dan netralitas Polri ke depan. Terakhir, mayoritas responden juga ingin agar Polri bersikap lebih profesional, adil, dan independen untuk memperbaiki kinerja Polri di tahun-tahun mendatang.



### Kesimpulan

Harapan publik terhadap perbaikan Polri sangatlah tinggi. Tentu ini menjadi tantangan sekaligus peluang yang baik bagi Kapolri untuk memberikan teladan sekaligus *legacy* yang baik untuk mendorong perbaikan Polri. Selama setahun terakhir, statemen dan langkah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sudah tampak menghasilkan sentimen positif, sekaligus mempertegas komitmennya untuk terus menavigasi proses perubahan Polri menjadi lebih baik, profesional dan berintegritas. Kendati demikian, capaian di tahun pertama bukanlah akhir dari segalanya. Proses penilaian rakyat masih terus berjalan (*history in the making*). Karena itu, Kapolri harus memastikan setiap instruksi dan arahan yang disampaikan benar-benar dapat diterjemahkan dan dijalankan dengan baik di level operasional, di lapangan. Tentu ini tidak mudah, tetapi dengan karakter struktur Polri yang bercorak semi-militeristik dengan model kepemimpinan *top-down*, seharusnya upaya percepatan perbaikan itu bisa lebih dioptimalkan.

Namun demikian, kita tentu menginginkan perubahan yang bersifat permanen, bukan simptomatik. Karena itu, langkah perubahan ini harus terus dikawal dengan menanamkan nilai-nilai integritas dalam setiap agenda pelayanan, pengayoman, dan perlindungan warga negara Indonesia. Catatan positif kinerja Polri terhadap agenda penanganan pidana terorisme, harus dilindungi dengan peningkatan komitmen dan integritas dalam menangani tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Langkah tepat Kapolri yang merekrut 52 mantan pegawai KPK sebagai ASN Polri harus terus didorong dan diperkuat agar bisa memberikan kontribusi riil dalam peningkatan kapasitas Polri dalam penanganan korupsi kecil (*petty corruption*) maupun korupsi besar (*state-captured corruption*) yang melibatkan uang besar, nama besar, dan kekuasaan ekonomi-politik yang besar. Kemampuan untuk memberantas dan mencegah korupsi akan

berdampak positif terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan daya saing investasi serta pembangunan ekonomi Indonesia.

Selanjutnya, harapan masyarakat terhadap profesionalitas dan independensi Polri dalam momentum menjelang pesta demokrasi Pemilu 2024 sangatlah tinggi. Netralitas Polri akan menjadi faktor penting untuk mengawal proses demokrasi menjadi lebih terkonsolidasi. Praktik eksploitasi politik identitas, penyebaran *hoax*, *fake news*, *hate speech*, dan *character assassinations* terbukti semakin menciptakan pembusukan melalui kuatnya *post-truth politics*. Polri yang memiliki otoritas besar, termasuk keberadaan Polisi Siber (*Cyber Police*) harus melangkah lebih progresif dalam mendorong terciptanya demokrasi yang sehat. Di tengah ruang kompetisi politik yang panas, Polri juga wajib memajukan independensinya. Polri tidak boleh menjadi alat kepentingan kelompok tertentu karena semua itu justru akan membuat kredibilitas Korps Bhayangkara terkoreksi lagi di mata rakyat.

Komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat akan terus diuji. Rakyat akan menilai dan membuktikan bagaimana Kapolri mampu melunasi janji-janjinya. Ikhtiar Kapolri untuk menghadirkan rasa keadilan ini sangat fundamental dan harus didukung bersama oleh segenap anak bangsa lintas kepentingan sosial-ekonomi dan politik, mengingat keadilan merupakan fondasi utama bagi hadirnya perdamaian. Sebaliknya, ketidakadilan merupakan sumber dari segala problematika bangsa (*injustice is the mother of all problems*). Di tahun-tahun selanjutnya, sebelum purna tugas, rakyat masih akan menggantung harapannya di pundak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Manfaatkan empat bintang bergaris merah di pundakmu untuk menghadirkan rasa keadilan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat, yang seringkali terlihat samar. Rakyat membutuhkan pembuktian. Selamat bekerja, Jenderal!



## Referensi:

- Bass, B. M., Avolio, B. J., Jung, D. I., & Berson, Y. (2003). *Predicting unit performance by assessing transformational and transactional leadership*. *Journal of Applied Psychology*, 88: 207-218.
- Economist Intelligence Unit (2021). "Democracy Index 2020: In sickness and in health? A Report by the Economist Intelligence Unit". New York. Akses via: <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/>
- Larmour, Peter dan Nick Wolanin (2009). *Corruption and Anti-Corruption*. ANU Press: Canberra.
- Mujani, Saiful (2020). "Intolerant Democrat Syndrome: The Problem of Indonesian Democratic Consolidation". *Jurnal Politik*, Vol 6 (1).
- Northouse, P. G. (2016). *Leadership: Theory and practice* (7th ed.). Sage.
- Power, Thomas (2018). "Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline". *Bulletin of Indonesian Economic Studies (ANU)*, Vol. 54 (3).
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government, Causes, Consequence and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press
- Umam, A. Khoirul (2021). "Koreksi Total Kinerja Demokrasi dan Anti-Korupsi di Indonesia", dalam LP3ES (2021). *Demokrasi Tanpa Demos Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi Di Indonesia*. LP3ES. Jakarta.
- Umar, Bambang Widodo (2013). "Polisi, Kekuasaan, dan Korupsi". *Kompas*. Edisi 2 Juli. Via: <https://nasional.kompas.com/read/2013/07/02/1333211/Polisi.Kekuasaan.dan.Korupsi?page=all>

## Hasil Survei Satu Tahun Kinerja Kapolri (2021)

paramadina  
public policy  
institute

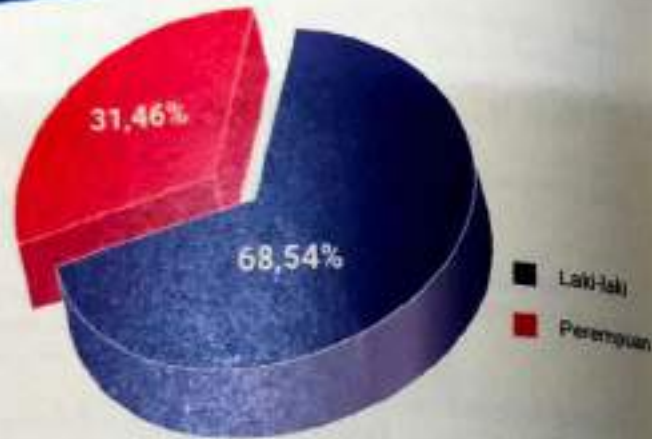
perse  
i

INDOSTRATEGIC  
Institute for Democracy and Strategic Studies



Profile Responden

Jenis Kelamin



Usia

- 17 Tahun - 24 Tahun
- 25 Tahun - 40 Tahun
- 41 Tahun - 56 Tahun
- 57 Tahun ke Atas



Suku



Mayoritas responden berasal dari suku Jawa

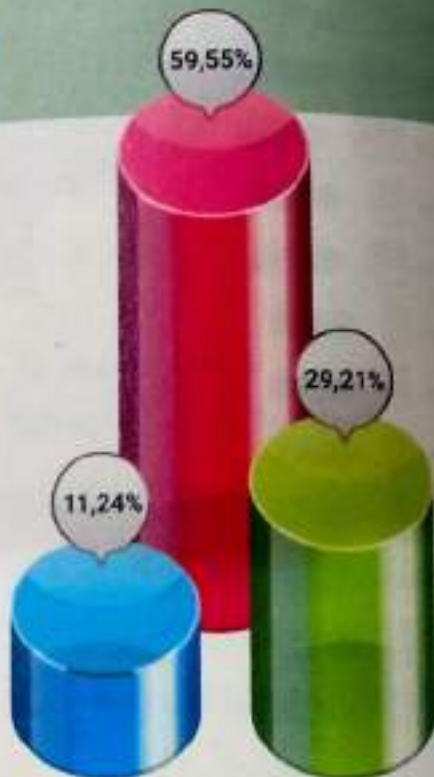


### Agama



### Pendidikan

- Sarjana
- Magister
- Doktor



### Profesi



### Bidang Lembaga





## Evaluasi Kinerja Satu Tahun Kapolri

Bagaimana penilaian Anda terhadap kinerja Kepolisian RI (Polri) selama setahun belakangan ini, di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo?



Kecenderungan responden yang merasa "Puas" dan "Tidak Puas" terhadap kinerja Polri selama satu tahun ini di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berimbang, 48,3% cenderung PUAS, 48,3% cenderung TIDAK PUAS.

Mengapa Bapak/Ibu/Saudara merasa PUAS dengan kinerja Polri setahun belakangan ini di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo?



Mengapa Bapak/Ibu/Saudara merasa TIDAK PUAS dengan kinerja Polri setahun belakangan ini, di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo?



51,2% responden yang merasa TIDAK PUAS dengan kinerja Polri setahun belakangan ini di bawah kepemimpinan Jend. Polisi Listyo Sigit Prabowo menilai, Polri kurang adil dalam menegakkan hukum di masyarakat.

Apakah Ibu/Bapak/Saudara mengetahui tentang program kerja PRESTASI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan) yang dicanangkan oleh Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo?



Sebesar 58,4% responden TAHU tentang program kerja PRESTASI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan) yang dicanangkan oleh Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.



[JIKA TAHU] Menurut Ibu/Bapak/Saudara, bagaimana pelaksanaan program PRESISI (Prediksi, Responsibilitas, Transparansi, Berkendali), yang berjalan di bawah kepemimpinan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo?



Sebesar 49,1% responden yang tahu mengenai program PRESISI merasa PUAS dengan pelaksanaan program tersebut.

Menurut Ibu/Bapak/Saudara, bagaimana kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menangani tindak pidana Terorisme di Indonesia setahun belakangan ini?



Sebesar 60,6% responden cenderung merasa PUAS terhadap kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menangani tindak pidana Terorisme di Indonesia setahun belakangan ini.

Mengapa Ibu/Bapak/Saudara merasa PUAS dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menangani tindak pidana Terorisme?



Sebesar 37,0% responden yang cenderung merasa PUAS dengan kinerja Polri dalam menangani tindak pidana Terorisme setahun belakangan ini menilai, di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Polri lebih efektif dalam menjalankan langkah pencegahan tindak terorisme.



Mengapa Ibu/Bapak/Saudara merasa TIDAK PUAS dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menangani tindak pidana Terorisme?



Sebesar 29,2% responden yang cenderung merasa TIDAK PUAS dengan kinerja Polri dalam menangani tindak pidana Terorisme setahun belakangan ini menilai, di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Polri kurang mampu memutus mata rantai jaringan terorisme dalam dan luar negeri.

Menurut Ibu/Bapak/Saudara, bagaimana kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menangani tindak pidana KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME?



Sebesar 61,8% responden cenderung merasa TIDAK PUAS dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menangani tindak pidana KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME.

Mengapa Ibu/Bapak/Saudara merasa PUAS dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menangani tindak pidana KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME?



Sebesar 37,9% responden yang cenderung merasa PUAS dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menangani tindak pidana KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME menilai, proses penyidikan dilakukan secara cepat dan profesional.



Mengapa Ibu/Bapak/Saudara merasa TIDAK PUAS dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menangani tindak pidana KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME?



Sebesar 36,4% responden yang cenderung merasa TIDAK PUAS dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menangani tindak pidana KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME menial, proses hukum tidak netral, transparan dan independen.

Menurut Ibu/Bapak/Saudara, bagaimana kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menangani kasus Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua setahun belakangan ini?



Sebesar 48,4% responden cenderung merasa TIDAK PUAS dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menangani kasus Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua setahun belakangan ini.

Menurut Ibu/Bapak/Saudara, bagaimana kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menangani fenomena buzzer, peredaran hoax, dan praktik kejahatan siber setahun belakangan ini?



Sebesar 50,6% responden cenderung merasa TIDAK PUAS dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menangani fenomena buzzer, peredaran hoax, dan praktik kejahatan siber setahun belakangan ini. Evaluasi Kinerja Satu Tahun Kapoti.

Menurut Ibu/Bapak/Saudara, bagaimana kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menjalankan program layanan SIM ONLINE?



Sebesar 60,7% responden cenderung merasa PUAS dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menjalankan program layanan SIM ONLINE setahun belakangan ini.



Menurut Ibu/Bapak/Saudara, bagaimana kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menjalankan program layanan TILANG ONLINE?



Sebesar 57,3% responden cenderung merasa PUAS dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menjalankan program layanan TILANG ONLINE setahun belakangan ini.

Setujukah Ibu/Bapak/Saudara, sekalian dengan langkah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang mengangkat 52 mantan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai ASN Polri?



Sebesar 65,2% responden cenderung SETUJU dengan dengan langkah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang mengangkat 52 mantan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai ASN Polri.

Seberapa Yakin Ibu/Bapak/Saudara Netralitas dan Independensi Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menghadapi Pemilu 2024?



Sebesar 49,5% responden cenderung YAKIN dengan Netralitas dan Independensi Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menghadapi Pemilu 2024.

Seberapa yakin Ibu/Bapak/Saudara, terhadap komitmen politik (political will) Presiden Joko Widodo dalam memperkuat kapasitas, profesionalitas, independensi, dan netralitas Polri ke depan?



Sebesar 50,6% responden cenderung YAKIN terhadap komitmen politik (political will) Presiden Joko Widodo dalam memperkuat kapasitas, profesionalitas, independensi, dan netralitas Polri ke depan.



### Apa Saran Ibu/Bapak/Saudara sekalian untuk memperbaiki kinerja Polri di tahun-tahun mendatang?



Mayoritas responden ingin agar Polri bersikap lebih profesional, adil, dan independen untuk memperbaiki kinerja Polri di tahun-tahun mendatang

### Kesimpulan Survei

- Kecenderungan responden yang merasa "Puas" dan "Tidak Puas" terhadap kinerja Polri selama satu tahun ini di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berimbang. (48,3% cenderung PUAS, 48,3% cenderung TIDAK PUAS).
- Sebanyak 37,2% responden yang merasa PUAS dengan kinerja Polri setahun belakangan ini di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menilai, Polri responsif melayani aduan masyarakat.
- Sebanyak 51,2% responden yang merasa TIDAK PUAS dengan kinerja Polri setahun belakangan ini di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menilai, Polri kurang adil dalam menegakkan hukum di masyarakat.
- Sebesar 58,4% responden TAHU tentang program kerja PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan) yang dicanangkan oleh Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
- Sebesar 49,1% responden yang tahu mengenai program PRESISI merasa PUAS dengan pelaksanaan program tersebut.
- Sebesar 60,6% responden cenderung merasa PUAS terhadap kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal
- Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menangani tindak pidana Terorisme di Indonesia setahun belakangan ini.
- Sebesar 37,0% responden yang cenderung merasa PUAS dengan kinerja Polri dalam menangani tindak pidana Terorisme setahun belakangan ini menilai, di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Polri lebih efektif dalam menjalankan langkah pencegahan tindak terorisme.
- Sebesar 29,2% responden yang cenderung merasa TIDAK PUAS dengan



kinerja Polri dalam menangani tindak pidana Terorisme setahun belakangan ini menilai, di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Polri kurang mampu memutus rantai jaringan terorisme dalam dan luar negeri.

- Sebesar 61,8% responden cenderung merasa TIDAK PUAS dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menangani tindak pidana tindak pidana KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME.
- Sebesar 37,9% responden yang cenderung merasa PUAS dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menangani tindak pidana tindak pidana KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME menilai proses penyidikan dilakukan secara cepat dan profesional.
- Sebesar 36,4% responden yang cenderung merasa TIDAK PUAS dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menangani tindak pidana tindak pidana KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME menilai proses hukum tidak netral, transparan dan independen.
- Sebesar 48,4% responden cenderung merasa TIDAK PUAS dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menangani kasus Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua setahun belakangan ini.
- Sebesar 50,6% responden cenderung merasa TIDAK PUAS dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menangani fenomena buzzer, peredaran hoax, dan praktik kejahatan siber setahun belakangan ini.
- Sebesar 60,7% responden cenderung merasa PUAS dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menjalankan program layanan SIM ONLINE setahun belakangan ini.
- Sebesar 57,3% responden cenderung merasa PUAS dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam menjalankan program layanan TILANG ONLINE setahun belakangan ini.

“

Saya mendapat masukan dan melihat adanya isu dan persepsi negatif khususnya terkait dengan kultur anggota Polri, seperti pelayanan Polri yang dianggap berbelit-belit; ucapan, sikap, dan perilaku yang kasar; pungli di sektor pelayanan, penanganan kasus yang terkesan "tebang pilih", dan menampilkan perilaku yang menimbulkan kebencian masyarakat.

”

Jenderal Listyo Sigit Prabowo



## BAGIAN 3

### Jejak Langkah Sigit



## 365 HARI MEMIMPIN KORPS BHAYANGKARA

**J**enderal Listyo Sigit Prabowo merupakan Kapolri ke-26. Dilantik di tengah Indonesia dan bahkan dunia mengalami pandemi Covid 19. Praktis dia langsung memimpin Korps Bhayangkara membantu pemerintah menekan penyebaran Covid 19. Di akhir 2021, Indonesia merupakan negara di posisi pertama di-ASEAN dalam menekan penyebaran Covid 19.

Di penghujung 2021 pula, muncul rentetan kasus pelanggaran oknum kepolisian. Sigit panggilan akrab Listyo Sigit Prabowo merespon dengan peringatan "potong kepala" bila tidak mampu menindak tegas anak buah. Kebijakannya untuk melakukan reformasi birokrasi di Polri masih diharapkan, mengingat masa jabatannya masih panjang.



3

Jumlah anak dari pernikahan dengan Juliati Sapta;

- Cornelius Krishna Satya Patria Wardhana.
- Kristine Sheilla.
- Leovan Natanael Prabowo.



52

Usia saat dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Jokowi.



53

Usia saat ini.



15

Tanda jasa yang diterima selama mengabdikan.



356

Hari menjabat Kapolri dan terus bertambah.





● **5 Mei 1969**

Lahir di Ambon, Maluku dari keluarga TNI Angkatan Udara. Ayahnya merupakan Mayor (Admi) Y. Sutrisno dan ibunya bernama Elisabeth Supriyati.

● **1986**

Ditema di sekolah negeri favorit tingkat sekolah menengah atas, SMA N 8 Yogyakarta.

● **1988**

Lolos seleksi masuk Akademi Kepolisian (Akpil).

● **1991**

Lulus dari Akpil di tahun tersebut dan menjabat sebagai Perwira Samapta Kepolisian Resor Metro Tangerang.

● **2003**

Mengemban tugas menjadi Kapolsek Tambora.

● **2009**

Menjabat sebagai Kapolres Pati.

● **2010**

Mendapat amanah sebagai Kapolres Sukoharjo.

● **2011**

Menduduki jabatan sebagai Kapolres Surakarta.

● **2013**

Demutasi menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara.

● **2014**

Dipercaya menjadi ajudan Presiden Jokowi.

● **2016**

Diamanahi untuk menjadi Kapolda Banten.

● **2018**

Menjabat sebagai Hadiwpropert.

● **2019**

Menjadi jenderal bintang tiga dengan jabatan Kabareskrim Pol.

● **2021**

Dilantik Presiden Jokowi menjadi Kapolri pada 27 Januari.







Jalan Presti Kapolri  
Aksi, Refleksi, Pandemi

## SETAHUN KINERJA KAPOLRI

**28 JANUARI 2021**

Ketua DPRD Sidoarjo Sidiq: Kapolri Listyo Sigit Prabowo NU Cabang Nestrani

**30 JANUARI 2021**

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Silaturahmi ke DPP Rabithah Alawiyah

**29 JANUARI 2021**

Kapolri Sambangi PP Muhammadiyah

**31 JANUARI 2021**

Pertama kalinya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berduet dengan Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto. Mereka bersama-sama meninjau penerapan protokol kesehatan di Pasar Jabung dan Pasar Tanah Abang.

Jalan Presti Kapolri  
Aksi, Refleksi, Pandemi



**1 FEBRUARI 2021**

Mengeluarkan telegram 37/183/1/Ops.2.2021 tentang Operasi Aman Nusa II dan Operasi Aman Nusa II. Ada enam instruksi yang intinya meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dengan penanganan Covid 19.

**11 FEBRUARI 2021**

Tribrata mengerahkan 13.500 personel Polri menjadi sukamata dan 40.336 Bhayikamabata menjadi tracer Covid 19.

**3 FEBRUARI 2021**

Temu Jaksa Agung, Kapolri Bahas Pemberkasan Perkara Secara Cepat.

**2 FEBRUARI 2021**

Kapolri Listyo Sigit Temui Ketua MA Bahas Tilang Elektronik.

**9 FEBRUARI 2021**

Bertemu Pimpinan KPK, Kapolri Kami Sepakat Jalin Investigasi Kasus Korupsi.

**16 FEBRUARI 2021**

Kapolri Minta Ketua Mahkamah Agung Segera Cegah Korupsi.

**19 FEBRUARI 2021**

Korpsi Bhayikamabata mengeluarkan surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 tentang penanganan U/L ITE yang mengutamakan pelayanan Polri.

**18 FEBRUARI 2021**

Korpsi Bhayikamabata dengan izin digelar Kompetisi Piala Mangora 2021. Di tingkat yang sama, Kapolri menginstruksikan kasatwil untuk tidak ragu mengusut kasus mafia tanah, setiap peluangnya.

**8 MARET 2021**

Kapolri Jamin Penindakan 3 Polisi Penembak Pengawal Habib Rizieq Transparan.

**9 MARET 2021**

Kapolri Temui Ketua Komisi Nasional MHF Minta Evaluasi dan Koreksi untuk Polri.



**17 MARET 2021**

Buka Rakernis Barito Kalimantan  
Kapolda: Pesisir Dinilai dari  
Fungsi Intelijen

**28 MARET 2021**



Kapolda Menata Masyarakat Tak Pariklibai  
Bom Katedral Makassar

**23 MARET 2021**

Polri mencatat kewenangan pamy di kan  
1.062 Polsek. Pembabatan kewenangan  
itu merupakan efisiensi, salah satu  
pertimbangannya jarak antara Polsek  
dan Polres yang dekat.

**31 MARET 2021**

Terroris "long wall" benilai  
ZA menyerang Mabes Polri  
menggunakan alat bom gunc ZA  
tewas ditindak oleh anggota  
kepolisian dalam kejadian itu.

**13 APRIL 2021**

- Di Rakernis Propam, Kapolda Minta Polisi  
Terlibat Narkoba Dinyasakan
- Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi SIHAR,  
Perampangan SIM Cukyo Lewat Handphone

**5 APRIL 2021**

Lebih  
Lurus

**22 APRIL 2021**



**5 APRIL 2021**

Kapolda  
Propam  
Lampung  
Korlantas  
Korlantas

Kapolda merencanakan semua kapolda Polri  
membantu pondokan kapal ke am KRI  
perampangan yang libang di antara Bali



**26 APRIL 2021**

Luncurkan SP2HT online dan e-PHNS, Kapriin Jamin Transparansi Penyidikan

**5 MEI 2021**

Jenderal Listyo Sigit Paling Hister Ya Diwibinkandibmas

**9 MEI 2021**

Kapriin menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, menutup tempat usaha yang berisiko tinggi, dan menerapkan kebijakan larangan masuk ke tempat umum untuk mencegah penyebaran Covid-19

**8 MEI 2021**

Tepat 100 hari mengabdikan 100 hari membantu masyarakat melalui aplikasi pengaduan masyarakat Presso (Dinamix Presso)

**27 APRIL 2021**

Tepat 60 hari program Presso Kandon, Berpilih, menyelesaikan 1.354 perkara menggerakkan produktivitas restorasi justice

**13 MEI 2021**

Kapriin menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, menutup tempat usaha yang berisiko tinggi, dan menerapkan kebijakan larangan masuk ke tempat umum untuk mencegah penyebaran Covid-19

**20 MEI 2021**

Kapriin Luncurkan Helpline 110, Layanan Polisi Semudah Pesan Pizza

**31 MEI 2021**

Kapriin Listyo Sigit Beri Izin Pelaksanaan Kompetisi Liga 1 dan 2

**27 MEI 2021**

**SUKSESKAN PON XX 2021 DI PAPUA**



**17 MEI 2021**

Kapriin Berhimpun Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Daerah untuk membahas strategi pengamanan PON dan persiapan di Papua

Kapriin Siapkan Strategi Pengamanan PON dan Persiapan di Papua



**3 JUNI 2021**

Kapolda minta jajaran jajar-  
kepercayaan masyarakat  
terhadap Polri

**10 JUNI 2021**

Ditujukan Jokowi, Kapolri  
Gelar Veteran Perintakaan  
Semua Kapolda berantas  
Pungli

**14 JUNI 2021**

Polri gila 429 ton  
Sabu Sabu Sejenis  
Rp 1,6 Triliun

**8 JUNI 2021**

Jenderal Sigit  
Targetkan Tahun  
2022 Indonesia  
Bebas COVID-19

**11 JUNI 2021**

Kapolda memberikan pembinaan  
kepada Kapolda dan Kapotres  
yang belum menandatangani  
bentuk komitmen kejawatan  
Korupsi dan Narkoba

**23 JUNI 2021**

Monkesdiplo-Jaksa  
Agung-Kapolda Tekan  
SKB Pedoman UU ITE  
untuk Patal Karet



**1 JULI 2021**

HUT Bhayangkara ke-75,  
Jenderal Listyo Bebarkan  
Capaian Kinerja

**30 JUNI 2021**

Polri Menetapkan Quota  
WTP dan BTK

**5 JULI 2021**

Merrespon kelangkaan dan  
harga obat yang tinggi,  
Kapolda menginstruksikan  
Kasabwil untuk mengawasi  
distribusi dan pemakaian  
obat-obat terapi Covid 19

**16 JUNI 2021**

Kapolda Kirim Pakar MIT  
Untuk Edukasi





**7 OKTOBER 2021**

Tagar #percepatlaporkas viral setelah diumumkan penghentian penyidikan kasus dugaan pemerkosaan ayah terhadap tiga anak kandungnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

**12 OKTOBER 2021**

Kapolri menginstruksikan jajaran untuk menindak platform online ilegal.

**9 OKTOBER 2021**

57 eks pegawai KPK memberikan sinyal menerima tawaran kapolri menjadi ASN Polri.

**15 OKTOBER 2021**

Bali, memisahkan jalan menindak 31 kasus pidana ilegal dan 500 laporan soal pidana ilegal.

**18 OKTOBER 2021**

Kapolri mengapresiasi warga yang menindak tegas anggota pelanggar dan memberikan kekerasan berlebihan. Dengan itu merespon kejadian Brigadir melakukan smu 1800-an terhadap mahasiswa pernamas tersebut unjuk rasa.

**20 OKTOBER 2021**

Kapolri Persiapkan Peserta Lomba Mural Kritik Polri

**19 OKTOBER 2021**

Kapolri membenarkan pesan yang beredar untuk menindak oknum pelanggar. Bila tidak Mabes Polri akan menghibahkan kasus.

**26 OKTOBER 2021**

Kapolri Jenderal Hoegeng Menginspirasi Polri dan Masyarakat

**27 OKTOBER**

Pesan Kapolri soal kepemimpinan: Ikan Busuk Mulai dari Kepala

**5 NOVEMBER 2021**

Kapolri Bicara di Acara Perforansi, Optimis Bisa Ubah Citra Polri

**10 NOVEMBER 2021**

Lantik Pejabat Baru Kapolri Padamkan 'Korupsi' di Kepolisian

**7 NOVEMBER 2021**

- Kapolri: Cita-kelompok seperti ini, tak akan ada. Tetap. Harus. Gagal.
- Kapolri: Polisi Terus Perjuangkan Keselamatan Bangsa

**1 NOVEMBER 2021**

Merealisasikan agenda reformasi perorg kepala, Kapolri menyoal ke dalam kapolres dari satu dirpolairud.

**1 DESEMBER 2021**

HUT Ke-71 Korpolairud, Kapolri Optimalkan Pelaksanaan Tugas



**19 NOVEMBER 2021**

Ungkap Sebab-sebab Peristiwa yang Berakibatkan Kematian dan Luka-luka Bangsa Indonesia

**15 NOVEMBER 2021**

Kapolri Sebut Hasil Kerja di Bidang Keamanan dan Pertahanan Berarti 'Tiga'



**25 NOVEMBER 2021**

Kapolri Ungkap Dapat Rapor Merah Garis-gara Hasil Polisi Nekat



**4 DESEMBER 2021**

Kapolri Minta Jajetannya Terima Kritik dan Lakukan Perbaikan

**10 DESEMBER 2021**

Buka Lomba Dras, Kapolri Polri Awang, Tinggi HAM

**15 DESEMBER 2021**

Kapolri Akan Buat Komisi Pemberantasan Korupsi, Dipimpin Bintang Dua

**11 DESEMBER 2021**

Kapolri Jadi Ketua, Usulan Penghulu Badan Karan Spint Sapeda Indonesia (PKSSII) periode 2021-2025

**9 DESEMBER 2021**

Polri resmi melantik 44 eks pegawai KPK, 13 eks pegawai KPK lainnya menolak karena sudah bekerja dan alasan lainnya

**18 DESEMBER 2021**

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin pelaksanaan Operasi Lili untuk Natal 2020 dan Tahun Baru 2022. Operasi Lili ini berupaya untuk mencegah penyebaran Covid-19, khususnya varian Omicron.

**2 JANUARI 2022**

Operasi lili untuk Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 telah selesai. Kedua agenda tahunan tersebut berjalan lancar dan aman. Tidak ada aksi terorisme yang terjadi saat perayaan Natal, begitu juga dengan Tahun Baru.

**20 DESEMBER 2021**

Dalam kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kepercayaan publik terhadap Polri meningkat. Berdasarkan survei dari Populi Center 75 persen responden puas dengan kinerja Polri. Teknik pengambilan sample dengan menggunakan metode acak sederhana dengan margin of error kurang lebih 2,31 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

**17 DESEMBER 2021**

Menanggapi Pembantu Kepala Polri dan satu Kepala Diklat, Kapolri menghimbau agar praktik *work from home* dilakukan dengan disiplin.

#### 4 JANUARI 2022

Kapolri bertemu dengan Kepala Badan Perindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Bejmy Rhanidani membahas kasus kapal tenggelam yang berisikan pekerja migran Indonesia (PMI) di Perairan Malaysia. Dalam pertemuan itu, kepala BP2MI melaporkan adanya dugaan oknum kepolisian yang terlibat penyelundupan PMI ilegal.

#### 6 JANUARI 2022

Kapolri menandatangani aplikasi Monitoring Peranoma Presisi sebagai realisasi instruksi Presiden Jokowi memperketat protokol kesehatan pelaku perjalanan luar negeri (PELNU). Aplikasi itu bisa mendeteksi peserta karantina yang tidak patuh protokol dan mengawasi petugas karantina.

#### 10 JANUARI 2022

Kapolri mengubah nama Operasi Nampakawi menjadi Operasi Damai Caltenz 2022. Beribahan nama itu diikuti dengan penerbitan pendekatan kesjablembah dan penanganan kelangkaan kran (sal. berda. jata. (KRB).

#### 5 JANUARI 2022

Kapolri buka vaksinasi Merdeka Anak serentak di 30 provinsi.

#### 24 JANUARI 2022

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kapolri memastikan tercapainya penurunan pelanggaran anggota sefama 2021, untuk pelanggaran disiplin menurun 20,67 persen, pelanggaran k3ap menurun 37,29 persen dan pelanggaran pidana turun 18,31 persen.

Dalam acara yang sama Kapolri berencana menggelar Hugging Award. Penghargaan tersebut ditujukan untuk mencari sosok polisi seperti hugging yang jujur dan berani.

#### 12 JANUARI 2022

Instruksi Kapolri: Jangan Enggan Temui Warga dan Jaga Kepercayaan Publik

#### 25 JANUARI 2022

Beremu Kepala Kepolisian Malaysia, Kapolri Bahas Pekerja Migran Indonesia Ilegal hingga Penanganan Covid-19

#### 13 JANUARI 2022

Setelah diolimpi dendesal Ustyo Sali Prapowo, Polri siap untuk melaksanakan 11.811 kasus dengan metode restorative justice.





**26 JANUARI 2022**

Kapolda Sambut Penandatanganan  
Kesepakatan Ekstradisi Indonesia-Singapura



**27 JANUARI 2022**

Tidak sesederhana itu menjadi  
Kapolda, Jenderal Listyo Sigit  
Prabowo menjabarkan berbagai  
prestasinya. Dari keberhasilan  
menyita aset kasus SLSI senilai  
Rp 5,9 triliun, menghemat Rp 4,5  
miliar, hingga Rp 443 miliar dan  
247 kasus korupsi, dan dua kasus  
pembunuhan yang telah selesai  
dituntaskan melalui proses  
hukum ekstradisi.

“

Akun media sosial seperti *twitter*,  
*Instagram*, *youtube*, *tik tok*  
dan *facebook* merupakan wujud  
transparansi dan akuntabilitas  
saya sebagai seorang pimpinan  
Polri. Akun-akun tersebut  
menginformasikan kepada  
masyarakat tentang pelaksanaan  
tugas yang dilakukan sehari-hari.

”

Jenderal Listyo Sigit Prabowo

## BAGIAN 4

Kapolri Menjawab,  
Kita Berharap



**S**ebagai lakon utama dalam buku ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meluangkan waktu untuk memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang diajukan padanya. Namun karena padatnya jadwal orang nomor satu di tubuh korps baju cokelat itu wawancara akhirnya dilakukan secara tertulis. Berikut petikannya.

#### Question

Agenda yang super padat membuat istirahat bapak pasti kurang, sementara bapak harus selalu bugar. Bagaimana cara menjaga kebugaran di tengah pandemi yang juga belum usai, apa olahraga yang ditekuni selama ini?

#### Answers

Saya menyukai olah raga bela diri judo sampai dengan level Dan 1. Salah satu alasan saya menyukai bela diri

judo karena dalam olahraga tersebut terkandung filosofi yaitu jika kita jatuh bangun dan kemudian jatuh bangun kembali, maka kita bisa belajar untuk bisa menjadi lebih baik. Setelah menjatuhkan atau mengalahkan lawan, kita juga diajarkan untuk langsung menolong dan menyelamatkan untuk kembali bangkit.

Selain judo, saya juga menekuni olah raga bulu tangkis. Saya menyempatkan berolah raga bulu tangkis

secara rutin untuk menjaga kebugaran tubuh sehingga selalu siap dalam melaksanakan tugas.

### Question

Sebelum menjadi Kapolri, menurut bapak *problem terbesar* kepolisian itu apa? Apakah soal kultur, instrumen, atau struktur?

### Answers

Sejak dipisahkan dari ABRI, tentunya Polri harus segera melakukan reformasi baik itu struktural, instrumental, maupun kultural. Upaya reformasi struktural dan instrumental telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan Kapolri, doktrin, dan sebagainya untuk mengubah *mind set* sebagai institusi sipil yang netral dan profesional.

Sejak diusulkan sebagai Kapolri oleh Bapak Presiden, saya telah berkeliling, berkunjung dan melakukan silaturahmi dengan para tokoh agama, tokoh politik,

dan tokoh masyarakat untuk bisa mendapatkan maupun menyerap seluruh aspirasi, harapan, dan suara masyarakat. Saya juga melihat beberapa hasil survei, termasuk juga harapan-harapan yang dititipkan dari pimpinan Polri pada masanya.

Pada waktu itu, saya mendapat masukan dan melihat adanya isu dan persepsi negatif khususnya terkait dengan kultur anggota Polri, seperti pelayanan Polri yang dianggap berbelit-belit; ucapan, sikap, dan perilaku yang kasar; pungli di sektor pelayanan, penanganan kasus yang terkesan "tebang pilih"; dan menampilkan perilaku yang menimbulkan kebencian masyarakat. Kami menerima dan menyadari sepenuhnya bahwa persepsi negatif tersebut merupakan realita di masyarakat yang harus dibenahi oleh Polri.

Kemudian, saya merumuskan kebijakan Transformasi Menuju Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan yang dikenal dengan PRESISI.

Transformasi menuju Polri yang PRESISI meliputi Transformasi Organisasi, Transformasi Operasional, Transformasi Pelayanan Publik, dan Transformasi Pengawasan. Harapannya kebijakan ini dapat menyelesaikan reformasi kultural Polri sehingga terwujudnya Polri yang dekat dan dicintai masyarakat.

### Question

Setelah menjadi Kapolri, apakah ada perubahan pandangan soal *problem terbesar* kepolisian itu?

### Answers

Sebagai organisasi yang adaptif, Polri senantiasa mendengarkan persepsi dan harapan masyarakat. Salah satunya melalui laporan berbagai lembaga survei yang kredibel. Polri senantiasa melakukan evaluasi secara berkala terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Sebagai contoh, saat pemberitaan di media online dan media sosial sempat ramai terkait dengan penyimpangan oknum anggota Polri, maka pada waktu itu hasil survei menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri. Baru setelah dilakukan berbagai upaya pembenahan dan penguatan komunikasi publik, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri kembali meningkat. Artinya, kultur anggota Polri mendapatkan perhatian penting dan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada Polri.

Untuk itu, saya sering mengingatkan bahwa setiap anggota Polri harus mengembangkan tiga kompetensi yaitu kompetensi teknis, kompetensi *leadership*, dan kompetensi etis. Kompetensi teknis berkaitan dengan melaksanakan tugas dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Kompetensi *leadership* berkaitan dengan kemampuan untuk menggerakkan sumber



daya yang ada untuk mencapai tujuan.

Penekanan utama ada pada kompetensi etika untuk melakukan perubahan kultur sesuai dengan harapan masyarakat. Bagaimana nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya menjadi dasar pelaksanaan tugas secara etis. Apabila nilai-nilai tersebut sudah dibiasakan, hal tersebut akan membentuk perilaku kita. Ketika norma dan moral sudah menjadi keutamaan, anggota Polri tidak akan melakukan pelanggaran. Kemudian, perilaku anggota Polri akan mengubah budaya organisasi. Perubahan kultur dan budaya organisasi ini yang akan mewujudkan Polisi yang dicintai dan dekat dengan masyarakat.

Ketiga kompetensi ini terus dikembangkan dimulai dari proses rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, serta di satuan kewilayahan untuk menanamkan gagasan dan tindakan yang sesuai dengan nilai, norma, doktrin, dan etika Polri.

Puji Tuhan, syukur alhamdulillah, hasilnya sangat memberikan energi dan semangat untuk terus berubah menjadi lebih baik karena terjadi peningkatan kepercayaan terhadap Polri. Hasil capaian yang baik tersebut didasarkan pada hasil survei yang diselenggarakan oleh beberapa lembaga survei nasional yang kredibel pada bulan Januari 2022, dengan hasil sebagai berikut:

1. Survei Charta Politika, dimana saat ini Polri menempati urutan ketiga lembaga tinggi negara paling dipercaya sebesar 75,9% dibandingkan pada bulan Maret 2021 yang menduduki urutan keempat sebesar 70,8%.
2. Survei Indikator Politik Indonesia, dimana angka kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebesar 81,3%.

Tentunya, capaian ini bukan merupakan tujuan akhir, tapi pondasi awal dalam keberlanjutan program transformasi menuju Polri yang

**PRESESI.** Polri berkomitmen untuk terus konsisten meningkatkan capaian kinerja agar mampu mengubah potret Polri sesuai dengan harapan masyarakat.

### Question

Atas pandangan apa bapak mengeluarkan aturan tentang *restorative justice* dan kini lebih berhati-hati dalam menggunakan 'pasal karet' dalam UU ITE?

### Answers

Saat ini, masyarakat menuntut Polri untuk memberikan rasa keadilan khususnya terkait penanganan perkara. Muncul persepsi-persepsi negatif di masyarakat yang harus segera dikikis dan diperbaiki, seperti adanya istilah hukum tumpul ke atas tajam ke bawah, jangan ada lagi kasus nenek Minah dipidana, kasus ibu dilaporkan anaknya dan dipenjarakan, serta kasus kasus lain yang mengusik



ISKRMEWA

Bentuk Strategi Komunikasi Publik. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi me-launching Polri TV dan Radio di Gedung Divisi Humas Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, sebagai bagian dari upaya Korps Bhayangkara untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat melalui strategi komunikasi publik dengan memanfaatkan kemajuan dan perkembangan teknologi.



rasa keadilan. Persepsi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan rasa keadilan dibandingkan dengan penerapan hukum secara kaku. Oleh karena itu, Polri mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Khusus Undang-undang ITE, sebenarnya UU ITE sangat penting dalam melindungi hak-hak masyarakat terhadap ancaman kejahatan siber. Namun demikian, adanya istilah "pasal karet" dalam penerapan UU ITE juga sering menjadi pembahasan ditengah masyarakat. Pasal-pasal ini sering menimbulkan multitafsir sehingga membuat saling lapor dan perpecahan di antara masyarakat.

Pemerintah bersama dengan DPR RI saat ini sedang merumuskan revisi UU ITE. Sambil menunggu revisi tersebut, Polri melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan Polri sehingga

penegakan hukum terhadap kasus-kasus UU ITE dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, yaitu: melakukan upaya edukasi kepada masyarakat di ruang siber melalui program Siber TV dan Polisi TV Radio. Patroli Siber dan Peringatan *Virtual Police* sebagai upaya pencegahan berupa pengiriman pesan khusus kepada terduga pelaku kejahatan berisi peringatan bahwa ia diduga melakukan tindak pidana siber tertentu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *restorative justice*.

Sambil menunggu revisi UU ITE, Polri telah melakukan upaya untuk melimitasi penyidik dalam penggunaan UU ITE, sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif tanggal 19 Februari 2021.
2. Surat Telegram nomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 terkait Pedoman

Penanganan Perkara Tindak Pidana Perkara Siber tanggal 22 Februari 2021.

3. Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam UU ITE tanggal 23 Juni 2021.

Dalam setiap tahap penyidikan dan penetapan tersangka UU ITE, penyidik juga harus melaksanakan gelar perkara kepada Kabareskrim melalui Dirtipidsiber.

### Question

Bapak juga berusaha keras untuk menggunakan sejumlah instrumen teknologi dan aplikasi untuk melayani masyarakat. Seperti tilang elektronik, layanan 110, SIM online, Dumas online, Propam Presisi, SKCK online, SP2HP online, dan lain sebagainya. Apa alasannya pak? Dan bagaimana hasilnya? Apakah niat 'melapor polisi semudah

memesan pizza' saat ini sudah terwujud?

### Answers

Sebagaimana kita ketahui, perkembangan revolusi industri 4.0 dan *society 5.0* menjadi tantangan bagi kepolisian. Di satu sisi, revolusi industri 4.0 memunculkan kejahatan bermodus operandi baru dan berdimensi baru. Di sisi lain, transformasi digital memungkinkan Polri memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pandemi Covid-19 juga memberikan hikmah bahwa interaksi antara petugas dengan masyarakat menimbulkan potensi penularan Covid-19. Permasalahan tersebut membuat Polri melakukan akselerasi transformasi digital sehingga pelayanan tetap dapat berjalan tanpa menimbulkan risiko penularan. Selain itu, pembatasan interaksi antara petugas dengan masyarakat juga menghilangkan potensi penyimpangan oleh oknum anggota Polri.

Dalam kebijakan Transformasi



Menuju Polri yang PRESISI, digitalisasi dan modernisasi kepolisian menjadi *game changer* dalam transformasi dibidang pembinaan, operasional, pelayanan publik, dan pengawasan.

Peluncuran aplikasi-aplikasi di bidang pelayanan ini akan memberikan pelayanan kepolisian yang lebih cepat, mudah, dan inklusif. Saat ini, masyarakat dapat mengakses layanan kepolisian dari gawai pintarnya kapan saja dimana saja tanpa harus datang ke kantor kepolisian.

Sebagai contoh: penataan kembali layanan darurat/*hotline* kepolisian nomor tunggal 110 secara nasional memungkinkan masyarakat membuat laporan polisi dan perlindungan dimanapun dan kapanpun. Pelayanan dibidang lalu lintas antara lain perpanjangan SIM, ujian SIM *online* di 32 Polda, pengesahan STNK *online* di 29 Polda sehingga masyarakat tidak perlu pergi jauh ke lokasi Satpas atau Samsat di daerah asal. Pelayanan SKCK *online*. Pelayanan SP2HP *online*.

Termasuk juga pengaduan masyarakat yang dapat langsung disalurkan melalui aplikasi Dumas Presisi dan Propam Presisi. Masyarakat dapat mengetahui perkembangan laporannya dengan disertai indikator yang terukur.

Tentunya, kehadiran aplikasi-aplikasi ini membuat masyarakat lebih mudah dalam melakukan pelaporan kapan saja dan dimana saja. Namun, transformasi digital yang dilakukan oleh Polri belum selesai. Pembangunan Pusat Data Kepolisian yang saat ini masih berlangsung akan menjadikan transformasi digital menjadi lebih terintegrasi. Ke depan, masyarakat akan lebih nyaman dalam mendapatkan akses layanan kepolisian melalui satu aplikasi saja.

### Question

Dalam hal pelayanan kepolisian, bapak juga berencana membebaskan sejumlah Polsek dari beban penyidikan dan bahkan

berupaya memenuhi target 1 kecamatan punya 1 Polsek. Apa alasannya?

### Answers

Polsek adalah satuan terkecil Polri yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Masyarakat berharap Kepolisian dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapinya sesuai dengan tugas pokok Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Polri mengutamakan upaya preventif dan preventif serta penyelesaian masalah dengan cara *restorative justice* atau mediasi. Dalam kebijakan Transformasi Organisasi tepatnya pada program penataan kelembagaan, diwujudkan melalui penguatan Polres dan Polsek sebagai lini terdepan pelayanan Polri dimana pemenuhan satu kecamatan dan satu Polsek dilakukan secara bertahap, serta menjadikan Polsek sebagai basis resolusi dengan memprioritaskan kegiatan Harkamtibmas sehingga ke depan di beberapa Polsek

tertentu tidak lagi dibebankan dengan tugas penyidikan.

Saat ini sudah terdapat 1.062 Polsek di 343 Polres yang telah diubah kewenangannya, untuk kegiatan pemeliharaan Kamtibmas dan tidak melakukan penyidikan. Perubahan kewenangan tersebut akan membuat sumber daya yang ada di Polsek lebih fokus dalam membina masyarakat dan menyelesaikan permasalahan melalui pendekatan *restorative justice* dan mediasi. Tentunya, anggota Polsek tersebut mendapat pelatihan khusus untuk memahami dan memiliki kemampuan fungsi Binmas, Intelijen, Sabhara dan tentunya kemampuan tindakan pertama di TKP.

### Question

Terkait SOTK, bapak juga berencana membuat Kortas Tipikor, meningkatkan Div TIK, struktur Korbrimob, hingga membuat Direktorat PPA. Untuk apa dan apa jumlah personel Polri yang saat ini mencapai 450 ribuan





**Rakernis Gabungan.** Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran saat Rapat Kerja Teknis (Rakernis) gabungan Divisi Hukum (Divkum) Polri, Divisi Humas Polri, Divisi Hubinter Polri dan Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK) Polri, di Gedung Rupasana, Jakarta Selatan. Kapolri meminta kepada seluruh divisi tersebut untuk melakukan penguatan transformasi menuju Polri Presisi Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan.

**sudah cukup pak? Atau akan merekrut lebih banyak lagi bintangara dan perwira di 2022 ini?**

### Answers

Polri telah mengusulkan rencana pengembangan struktur dalam rangka penguatan organisasi, yaitu: pengembangan Korps Brimob Polri dalam rangka mengantisipasi perkembangan

ancaman bereskalasi tinggi dan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pengembangan Div TIK Polri dalam rangka mendukung transformasi digital pada Polri. Pengembangan Direktorat Tipikor Bareskrim Polri menjadi Kortas Tipikor dalam rangka perubahan pendekatan pemberantasan tindak pidana korupsi secara fundamental yaitu dengan mengutamakan pencegahan, *asset tracing*, dan *asset recovery*.

Juga pengembangan struktur Direktorat PPA di Bareskrim Polri sebagai upaya memperkuat perlindungan dan penindakan kejahatan terhadap perempuan dan anak. Lalu pengembangan Pusdokkes Polri dalam rangka mendukung program pemerintah dalam pengendalian Covid-19 dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pengembangan struktur Direktorat Siber Tingkat Polda dalam rangka penguatan upaya pencegahan dan penindakan hukum kejahatan siber. Pengembangan Divhubinter Polri dalam rangka mendukung tupoksi Polri dalam memerangi berbagai *transnational crime* serta untuk meningkatkan kerja sama kepolisian antar negara. Dan pengembangan struktur Sops Polri dalam rangka mendukung operasi-operasi kepolisian.

Untuk memenuhi kebutuhan personel terkait pengembangan organisasi, Polri akan meningkatkan jumlah rekrutmen pada tahun

2022. Sebelumnya kebijakan organisasi Polri adalah *zero growth recruitment* didasarkan pada jumlah anggota yang susut yaitu pensiun, PTDH, meninggal, dan berhenti. Kebijakan pembinaan organisasi Polri pada saat ini *normal growth* yaitu secara bertahap memenuhi kebutuhan organisasi.

Rencana rekrutmen Polri T.A. 2022 sebanyak 23.029 orang dengan rincian bintangara 21 ribu, tamtama 1.754, Akpol 175, dan SIPSS 100. Jumlah penerimaan bintangara Polri yang meningkat dari sebelumnya 15 ribu personel menjadi 21 ribu personel akan ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan organisasi khususnya Korps Brimob Polri, Densus 88, personel Bhabinkamtibmas, dan pengembangan personel terkait dengan pengembangan dan perkembangan Polres-Polres disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah.

### Question

**Dalam menangani berbagai kasus pelanggaran anggota,**



bapak pernah mengatakan ancaman 'potong kepala' tapi kasus pelanggaran masih terus terjadi. Apakah PRECISI bisa menuntaskan problem klasik ini di tengah harapan masyarakat yang meningkat?

### Answers

Saya berkomitmen untuk menindak tegas oknum-oknum yang melakukan penyimpangan secara transparan karena perbuatan oknum tersebut telah mencederai institusi. Sanksi tegas akan diberikan kepada personel yang melakukan penyimpangan atau melakukan penyalahgunaan wewenang. Bila tidak dilakukan langkah-langkah, perbuatan oknum anggota Polri ini akan mencederai anggota yang sudah baik. Terlebih lagi bagi pimpinan di masing-masing satuan kerja atau satuan kewilayahan.

Pimpinan harus mampu melakukan pembinaan dan pengawasan serta menjadi teladan kepada anggota. Saya tak ragu untuk menindak tegas pimpinannya (potong

kepala) apabila tidak mampu melaksanakan tugas tersebut. Ada pepatah mengatakan ikan busuk mulai dari kepala, kalau pimpinannya bermasalah maka bawahannya akan bermasalah juga. Pimpinan harus jadi teladan, sehingga bawahannya akan meneladani.

Selain itu, Polri juga melakukan penguatan fungsi pengawasan baik internal maupun eksternal. Masyarakat pencari keadilan tidak perlu menunggu kasusnya viral atau mengenal pejabat Polri untuk melakukan pengaduan. Seluruh pengaduan masyarakat akan mendapatkan perlakuan yang setara. Polri telah memiliki aplikasi Dumas Presisi dan Propam Presisi yang akan terus kami sosialisasikan dan kembangkan sehingga meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat.

Polri juga terus melakukan penguatan komunikasi publik sehingga hal-hal yang menjadi harapan masyarakat dapat tersalurkan dengan baik. Polri berkomitmen untuk tidak anti kritik dan senantiasa mendengarkan aspirasi

masyarakat sehingga Polri terus berubah menjadi lebih baik.

### Question

Bapak diapresiasi karena membuat lomba mural dan orasi kebebasan berekspresi, termasuk 'berani' merekrut eks penyidik KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Apa landasan berpikirnya?

### Answers

Sebagai negara demokrasi dan negara hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi pengakuan, penghargaan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Pengakuan ini telah ada sejak kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A sampai 28J, dan Pasal 29. Pada era reformasi, Hak Asasi



ISRIHWA

Berikan Keterangan. Juru Bicara Divisi Humas Polri Kombes Trunoyudo W Andiko memberikan keterangan terkait mantan pegawai KPK yang menjadi ASN Polri telah mengikuti pendidikan di Pusat Pendidikan Administrasi (Pusdikmiri) Polri Bandung.



Manusia dan kebebasan menyampaikan pendapat telah jauh mengalami perbaikan dibandingkan dengan era sebelumnya.

Dalam rangka menjunjung tinggi hak kebebasan berpendapat dengan tetap menghormati aturan yang berlaku, Polri berinisiatif menyelenggarakan Bhayangkara Mural Festival dan Lomba Orasi. Kegiatan tersebut sebagai wujud Polri dalam memperkuat komunikasi publik, bahwasannya Polri tidak anti kritik. Komitmen Polri menjunjung tinggi pendapat masyarakat, sekaligus saran edukasi kepada masyarakat terkait kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum;

Terkait dengan perekrutan eks penyidik KPK yang tidak lulus TWK menjadi ASN Polri, pertimbangan Polri adalah perlunya penguatan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami melihat kompetensi, pengalaman serta rekam jejak dari rekan-rekan 57 eks pegawai KPK di bidang

Tipikor yang sudah teruji pada saat bertugas di KPK. Terlebih pada saat ini, kami sedang mengusulkan pengembangan struktur Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menjadi Korps Pemberantasan (Kortas) Tindak Pidana Korupsi, sehingga membutuhkan tambahan sumber daya manusia yang ahli di bidang tindak pidana korupsi.

Sambil menunggu pengembangan struktur, eks-pegawai KPK tersebut bekerja sebagai Satuan Tugas Khusus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang langsung berada dibawah Kapolri. Dalam pelaksanaannya, Satgasus Pencegahan Tipidkor berkoodinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Tentunya hal tersebut sangat bermanfaat dalam rangka memperkuat jajaran Polri untuk memenuhi kebutuhan organisasi terkait penanganan tindak pidana korupsi, terutama dalam melaksanakan upaya-upaya pencegahan dalam mengawal kebijakan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional.

### Question

Bapak mengelola akun twitter sendiri untuk sarana komunikasi publik, menerima informasi, dan keluhan masyarakat terkait Polri. Kok sampai kepikir sejauh ini dan mengapa tidak mendelegasikan saja ke fungsi yang sudah ada? Apa info yang paling banyak disampaikan, apakah soal mafia tanah juga?

### Answers

Akun media sosial seperti twitter, Instagram, youtube, tik tok dan facebook merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas saya sebagai seorang pimpinan Polri. Akun-akun tersebut menginformasikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan tugas yang dilakukan sehari-hari. Selama ini, pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh anggota Polri

banya dilakukan melalui media *mainstream*. Dengan masuknya informasi ini di media sosial diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat secara lebih luas kepada seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, saya secara langsung ingin mengikuti perkembangan isu, keluhan, dan permasalahan masyarakat di lapangan. Dengan pembuatan akun-akun media sosial ini, terjadi komunikasi dua arah sehingga masyarakat juga dapat menyampaikan persepsinya terhadap Polri. Tentunya, pembuatan akun media sosial ini juga diikuti oleh jajaran Polri. Setiap harinya, rata-rata hampir 2 atau 3 pengaduan dari masyarakat dengan berbagai permasalahan dan saran yang kemudian kami respon dan diteruskan ke satker-satker terkait untuk ditindaklanjuti.